

**BENTUK DAN TUJUAN INTERVENSI RUSIA PADA KONFLIK
SURIAH TAHUN 2015-2018**

(Skripsi)

Oleh

RAISSA NAWANGSARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

ABSTRAK

BENTUK DAN TUJUAN INTERVENSI RUSIA PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2015-2018

Oleh

Raissa Nawangsari

Penelitian ini menganalisis bentuk dan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah dari tahun 2015 hingga 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah *humanitarian military intervention*, *intervention by invitation*, konsep kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka analitis. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari dokumen. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui studi pustaka dan dokumen statistik yang dikeluarkan oleh SIPRI dan *tradingeconomic*. Penulis berpendapat bahwa dari keenam tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah, tujuan melindungi stabilitas keamanan Negara dari ancaman terorisme, melindungi fasilitas militer, melindungi kerjasama perdagangan dan melindungi infestasi adalah tujuan yang paling ingin dicapai Rusia di Suriah. Berdasarkan analisa aspek kepentingan nasional yang digunakan, keempat tujuan diatas berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan perekonomian Rusia. Sedangkan tujuan *show of force* dan merubah sistem dunia internasional merupakan tujuan jangka panjang di dalam membangun kembali kejayaan Rusia di masa lalu dalam lingkup dunia internasional. Rusia diharapkan dapat mencapai tujuannya di Suriah dengan tidak merugikan Suriah.

Kata kunci: Kepentingan Nasional, Tujuan Rusia, Intervensi Rusia Pada Konflik Suriah.

ABSTRACT

FORM AND OBJECTIVE OF RUSSIA INTERVENTION ON THE SYRIA CONFLICT 2015-2018

By

Raissa Nawangsari

This study analyzes the form and purpose of Russian intervention in the Syrian conflict from 2015 to 2018. The concept used in the study is military intervention humanitarian, intervention by invitation, foreign policy concepts and the concept of national interest as an analytical framework. This research is descriptive qualitative type research using secondary data types obtained from documents. Data collection techniques were obtained through literature studies and statistical documents issued by SIPRI and tradingeconomic. The author argues that of the six objectives of Russian intervention in the Syrian conflict, the aim of protecting the stability of State security from the threat of terrorism, protecting military facilities, protecting trade cooperation and protecting infestations is Russian most wanted goal in Syria. Based on the analysis of the aspects of national interests used, the four objectives above directly affect the stability of national security and the growth of the Russian economy. While the purpose of the show of force and changing the international system is a long-term goal in rebuilding Russia's glory in the past in the international sphere. Russia is expected to achieve its objectives in Syria without harming Syria.

Keywords: National Interest, Russia objective, Russia Intervention in Syria Conflict

**BENTUK DAN TUJUAN INTERVENSI RUSIA
PADA KONFLIK SURIAH
TAHUN 2015-2018**

Oleh

RAISSA NAWANGSARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **BENTUK DAN TUJUAN INTERVENSI RUSIA PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2015-2018**

Nama Mahasiswa : Raissa Nawangsari

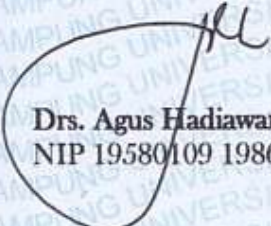
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316071038


Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002


Gita Karima, S.IP., M.Si
NIP 19870128 201404 2 001

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

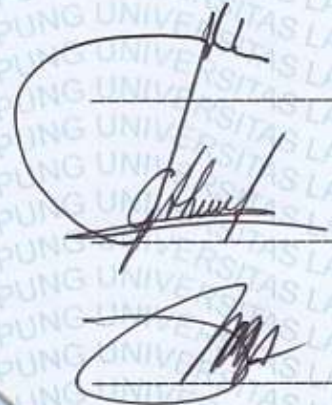
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

Sekretaris : Gita Karima, S.IP., M.Si

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Raissa Nawangsari
NPM 1316071038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raissa Nawangsari dilahirkan di Bogor pada 25 Januari 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Agung Priambodo dan Ibu Iin Rina. Penulis memulai jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Tiara Pertiwi Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2001. Melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di Kartika II-5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Mengengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis berhasil diterima di Universitas Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babakan, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari 2016.

MOTTO

“We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. If you can dream it, you can do it.”

(Waltz Disney)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati kupersembahkan tulisan sederhana ini kepada

“Allah SWT”

Atas kehendak-Nya semua ini ada

Atas anugerah-Nya semua dapat tercapai

“Kedua Orang tua Bapak Agung Priambodo dan Ibu Iin Rina”

Tulisan ini aku persembahkan sebagai wujud cinta dan baktiku sebagai seorang anak. Terima kasih atas segala cinta dan doa yang kalian berikan kepadaku untuk memampukanku menghadapi segala tantangan dalam menyelesaikan karya kecil

dan sederhanaku ini

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bentuk dan Tujuan Intervensi Rusia Pada Konflik Suriah Tahun 2015-2018”**. Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua terima kasih kepada papa dan mama atas doa, usaha, saran, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Perhatian yang diberikan oleh papa dan mama membantu penulis dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup penulis.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang selalu mendukung agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk ketersediaan waktu atas bimbingan, kritik, saran, ide dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu dalam membimbing proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas segala saran, ide, masukan, kritik dan dukungan selama proses

bimbingan berlangsung. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas waktu, saran dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si., telah bersedia menjadi dosen penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh jajaran dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
9. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
10. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Lampung, khususnya angkatan 2013
11. Seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan, doa dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung, Juli 2019

Raissa Nawangsari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Literature Review	10
2.2. Landasa Konseptual.....	18
2.2.1. Military Intervention	19
2.2.2. Intervention by Invitation.....	22
2.2.3. Kebijakan Luar Negeri.....	24
2.2.4. Kepentingan Nasional	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Fokus Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Teknik Analisis Data	39

IV. GAMBARAN UMUM.....	41
4.1. Sejarah Pemerintahan Suriah.....	41
4.2. Sejarah Konflik Suriah	47
4.3. Sejarah Intervensi Rusia	56
4.4. Intervensi Rusia Pada Konflik Suriah Tahun 2015-2018	59
4.5. Dinamika Kerjasama Rusia dan Suriah	67
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
5.1. Bentuk Intervensi Rusia Pada Konflik Suriah	74
5.1.1. <i>Military Intervention</i>	77
5.1.2. <i>Intervention by Invitation</i>	80
5.2 Tujuan Intervensi Rusia di Suriah.....	82
5.2.1. Melindungi Stabilitas Negara dari Ancaman Terorisme (ISIS).....	82
5.2.2. Melindungi Fasilitas Militer Rusia.....	86
5.2.3. Melindungi Kerjasama Ekspor Perdagangan Persenjataan	87
5.2.4. Melindungi Infestasi.....	94
5.2.5. Mempromosikan Kekuatan Militer Rusia.....	98
5.2.6. Mempertahankan pengaruh Rusia di Suriah	100
5.3. Tujuan Intervensi Rusia di Suriah Terhadap Kepentingan Nasional	102
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
6.1. Kesimpulan	107
6.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tabel Perbandingan Jurnal	17
5.1 Data Nilai Ekspor Persenjataan Rusia ke Suriah Tahun 2008-2012 Berdasarkan US\$ dollar	91
5.2 Jenis Ekspor Persenjataan Rusia ke Suriah Tahun 2008-2012 Berdasarkan Jumlah	92
5.3 Investasi Rusia di Suriah	94
5.4 Ekspor Perdagangan Persenjataan Rusia Berdasarkan US\$ dollar	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Jumlah korban konflik Suriah, 2011-2018.....	5
2.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	36
4.1. Sistem Pemerintahan Hafez Al-Assad	43
4.2. Peta Konflik Suriah tahun 2012	50
4.3. Peta Konflik Suriah Tahun 2014.....	52
4.4 Grafik Military Expenditure Rusia dan Suriah Tahun 2000-2012 Berdasarkan US\$ dollar	71
5.1. Index Terorisme Suriah Tahun 2011-2017 Berdasarkan GTI Score	83
5.2 Index Produksi Minyak Bumi Mentah Tahun 2010-2018	97

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
GTI	: <i>Global Terrorism Index</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IHL	: <i>International Humanitarian Law</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
NGO	: <i>Non-governmental Organization</i>
R2P	: <i>Responsibility to Protect</i>
SAM	: <i>Surface to Air Missile</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
UNHCR	: <i>United Nation Commissioner for Human Rights</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Negara melakukan intervensi ke Negara lain dengan berbagai macam bentuk dan tujuan intervensi. Dalam studi hubungan internasional intervensi digunakan Negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Menurut James F. Miskel terdapat tiga tujuan intervensi yaitu ; intervensi dengan tujuan kemanusiaan, intervensi untuk memberantas terorisme dan intervensi untuk mendapatkan *resource* (James F.Miskel, 2007 : 97-103). Intervensi yang dilakukan suatu Negara tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai, hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian.

Dalam melakukan intervensi, sebuah Negara mempunyai aturan dan ketentuan yang diatur dalam hukum internasional mengenai legalitas intervensi yang dilakukan ke Negara lain. Dalam konflik sipil, Negara asing tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dikarenakan penyelesaian konflik merupakan tanggung jawab dan hak Negara yang berkonflik. Dalam perkembangannya konflik sipil menyebabkan isu-isu hubungan internasional yang mengancam keamanan dan kepentingan dari banyak Negara, oleh karena itu banyak kasus konflik sipil yang pada akhirnya diintervensi oleh Negara lain. Salah satu tujuan sebuah Negara mengintervensi konflik sipil Negara lain adalah

melindungi stabilitas keamanan Negara dari ancaman terorisme. Tujuan untuk melindungi keamanan merupakan tujuan yang vital dan harus dipenuhi, dikarenakan keamanan merupakan kunci keberlangsungan sebuah Negara (K.J Holsti, 1987 : 723).

Sehingga jika keamanan suatu Negara terancam dengan aksi terorisme, maka Negara lain berhak melakukan intervensi untuk melindungi keberlangsungan Negara dari ancaman terorisme. Bentuk intervensi semakin berkembang seiring berkembangnya konflik internasional, seperti *intervention by invitation* dan *military intervention* yang digunakan Negara sebagai alasan intervensi menggunakan kekuatan militer ke Negara lain.

Penelitian ini menggunakan *intervention by invitation* dan *military intervention* sebagai bentuk intervensi dalam menganalisa objek penelitian. Intervensi yang dilakukan suatu Negara tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan Negara dalam mengintervensi konflik sipil akan dibahas secara lebih mendalam di dalam penelitian. Salah satu kasus intervensi yang akan dibahas adalah intervensi Rusia pada konflik Suriah. Konflik Suriah yang dimulai dengan aksi demonstrasi oleh masyarakat Suriah pada maret 2011, dianggap sebagai ancaman nasional oleh pemerintah Suriah. Konflik Suriah semakin berkembang dan mengancam keberlangsungan pemerintahan rezim Bashar Al-Assad. Konflik Suriah merupakan konflik antara pemerintah Suriah melawan pihak oposisi menggunakan kekuatan militer.

Di dalam jurnal yang ditulis oleh Janis Berzins terdapat tiga faktor kegagalan pemerintahan Bashar Al Assad yang mengakibatkan terjadinya konflik

Suriah yaitu: (Janis Berzins ,2013 :1-2). *pertama* adanya rasa saling tidak percaya antara kelompok masyarakat di Suriah. Kecurigaan antara kelompok masyarakat Suriah menyebabkan pertentangan. Sunni yang merupakan kelompok masyarakat mayoritas di Suriah, oleh karena itu kelompok minoritas seperti Allawite, Christian, Druze dan Shiite takut akan hegemoni dari kekuasaan Sunni.

Kedua, reformasi ekonomi Bashar Al-Assad untuk mempromosikan stabilisasi ekonomi dan menguatkan sektor privat dianggap gagal mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat di Suriah. Pemerintah Suriah mengaplikasikan ekonomi neoliberal yang berfokus pada IMF (*International Monetary Fund*) dan *world bank*, hasilnya menguatkan sektor finansial dan *real estate* dengan mengorbankan ekonomi rill. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bashar Al-Assad menyebabkan Investasi asing di Suriah meningkat namun perkembangan perekonomian pada sektor *agricultural* menurun.

Kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Bashar Al-Assad memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Suriah dengan diabaikannya sektor *agricultural* yang merupakan mata pencharian utama bagi masarakat Suriah. Pada awal pemerintahan Bashar Al-Assad tahun 2000 sektor *agricultural* di Suriah mengalami penurunan hasil panen akibat kekeringan dan kurangnya perhatian pemerintah Suriah, yang mengakibatkan krisis pangan terjadi di Suriah. Kerusakan pada sektor *agricultural* menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Suriah, dikarenakan petani kehilangan lapangan pekerjaannya. Kebijakan neoliberal di Suriah menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat dan kesehjateraan masyarakat berkurang.

Ketiga, adanya represi politik yang dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad. Rezim Bashar Al-Assad terhadap masyarakat Sunni, Suriah. Pemerintah Suriah mengistimewakan kelompok masyarakat minoritas terutama Allawite untuk menempati posisi penting pada pemerintahannya, sementara kelompok Sunni tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara adil di dalam pemerintahan Bashar Al-Assad. Diskriminasi politik yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap kelompok masyarakat Sunni menyebabkan kelompok masyarakat Sunni kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Suriah.

Kegagalan yang dilakukan pemerintahan Bashar Al-Assad menyebabkan, masyarakat Suriah melakukan aksi demonstrasi menuntut pergantian rezim pemerintahan Suriah. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah, kemudian berkembang menjadi konflik sipil yang besar akibat agresi militer yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap masyarakat Suriah atas demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Konflik Suriah terjadi antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi yang ingin menggantikan kepemimpinan rezim Assad di Suriah. Konflik Suriah mengakibatkan jumlah korban yang besar dan timbul isu-isu internasional seperti *refugee* yang menyebabkan konflik Suriah menjadi fenomena internasional yang diperhatikan oleh Negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

Konflik sipil yang terjadi di Suriah menarik untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan *pertama* konflik sipil mengakibatkan jumlah korban jiwa yang besar. Menurut data yang didapatkan dari *violation document center in Syria* terhitung dari maret 2011- januari 2018 konflik Suriah memakan korban jiwa sebanyak 184.061 jiwa yang bermayoritaskan penduduk sipil Suriah (<https://vdc-sy.net/wp-content/uploads>, 2018). Jumlah korban yang besar di Suriah menandakan bahwa

situasi konflik sipil sangat genting di Suriah, oleh karena itu Negara asing perlu mengintervensi konflik Suriah untuk membantu penyelesaian konflik. Jumlah korban yang besar juga menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap masyarakat Suriah.



Gambar 1.1 Jumlah Korban Konflik Suriah

Sumber *Violation Document Center in Syria (2018)*

Kedua alasan konflik Suriah menarik untuk dibahas karena keterlibatan banyak Negara dalam konflik Suriah seperti Rusia, Tiongkok, Iran dan AS. Keterlibatan Negara pada konflik sipil Suriah mempunyai tujuan dan kepentingan yang berusaha dicapai, sehingga penyelesaian konflik Suriah sulit untuk dicapai. Kehadiran Rusia dan AS membuat konflik Suriah semakin dinamis dengan perbedaan tujuan yang harus dicapai oleh kedua Negara. Rusia berusaha mempertahankan keberlangsungan pemerintahan Bashar Al- Assad, sementara AS mendukung pihak oposisi. Dukungan yang diberikan AS terhadap oposisi

dikarenakan, AS menganggap pemerintah Suriah telah melakukan upaya genosida terhadap masyarakat Suriah.

Kecaman diberikan AS kepada pemerintah Suriah pada tahun 2013, atas tindakan genosida yang dilakukan pemerintah Suriah dengan menggunakan senjata kimia di Ghouta dan mengakibatkan 1429 jiwa tewas yang bermayoritaskan masyarakat sipil Suriah (<http://www.iamsyria.org/2013.html> 2013). Tindakan yang dilakukan pemerintah Suriah menyebabkan AS menjatuhkan sanksi terhadap pelarangan penggunaan senjata kimia di Suriah. Kecaman dan sanksi yang diberikan AS kepada pemerintah Suriah ditanggapi oleh Rusia dengan berdiplomasi kepada AS yang menjanjikan bahwa pemerintah Suriah tidak akan menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah.

Pemerintah Suriah kembali melakukan serangan militer menggunakan senjata kimia di Dimshq, Homs, Daraa dan Idlib pada tahun 2015 sebanyak 6000 jiwa tewas karena serangan tersebut. AS kembali mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Suriah, namun Rusia menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mengusir ancaman terorisme ISIS di Suriah. Tindakan pemerintah Suriah terbukti telah melakukan upaya genosida terhadap masyarakatnya, namun Rusia tetap memberikan dukungan bahkan mengintervensi konflik Suriah menggunakan kekuatannya pada tahun 2015. Rusia berkerjasama dengan pemerintah Suriah melakukan operasi militer pada tahun 2015 untuk membantu pemerintah Suriah mempertahankan kekuasaannya. Operasi militer yang dilakukan kedua Negara mengakibatkan meningkatnya angka kematian di Suriah.

Dukungan yang diberikan Rusia kepada pemerintah Suriah memberikan pandangan, bahwa Rusia mendukung upaya genosida yang dilakukan pemerintah Suriah. Sementara AS mengecam tindakan pemerintah Suriah dan Rusia karena telah mendukung tindakan genosida yang dilakukan pemerintah Suriah. AS melakukan embargo ekonomi kepada Rusia untuk menghentikan intervensinya di Suriah, namun Rusia tetap mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad dengan alasan membantu pemerintah Suriah untuk menyelesaikan konflik sipil. Hal tersebut bertolak belakang dengan tindakan yang dilakukan Rusia di Suriah tidak menyelesaikan konflik sipil dan membuat konflik sipil semakin dinamis, Kehadiran Rusia di Suriah hanya menguntungkan pemerintahan Bashar Al-Assad, sehingga legalitas intervensi Rusia di Suriah perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas Intervensi Rusia menarik untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan, adanya kecaman yang diberikan AS tidak menghentikan intervensi yang dilakukan Rusia untuk mendukung pemerintah Bashar Al-Assad pada tahun 2015. Intervensi militer yang dilakukan Rusia dalam membantu pemerintah Suriah tentunya mempunyai tujuan atas keterlibatannya pada konflik Suriah. Intervensi militer yang dilakukan Rusia mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah korban konflik Suriah, hal ini menyebabkan Rusia dikecam oleh AS dalam membantu pemerintah Suriah melakukan upaya genosida. Berdasarkan hukum internasional perbuatan yang dilakukan Rusia telah melanggar HAM, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bentuk intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah. Berdasarkan hal tersebut, menjadikan pertimbangan penulis dalam menganalisis lebih lanjut mengenai bentuk dan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Rusia melakukan intervensi untuk membantu rezim Bashar Al-Assad menyelesaikan konflik Suriah.. Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah tahun 2015 mendapatkan kecaman dari AS karena mendukung pemerintah Suriah melakukan upaya genosida. Kecaman yang diberikan AS atas Rusia tidak menghentikan intervensi di Suriah, Intervensi militer yang dilakukan Rusia dalam membantu pemerintah Suriah tentunya mempunyai tujuan atas keterlibatannya pada konflik Suriah. Rusia mempunyai tujuan yang berusaha dicapai pada konflik Suriah, oleh karena itu rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimana bentuk dan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah tahun 2015-2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Bersasarkan Rumusan masalah yang dikekemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

- a) Mendeskripsikan bentuk intervensi Rusia pada konflik Suriah tahun 2015-2018
- b) Mendeskripsikan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah tahun 2015-2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dibagi menjadi dua manfaat penelitian yaitu :

- a) Manfaat Teoritis didalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kajian ilmu hubungan internasional mengenai konsep kepentingan nasional oleh Daniel S. Papp. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya terkait dengan bentuk dan tujuan intervensi terhadap konflik sipil Negara lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian studi hubungan internasional.

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hubungan internasional khususnya mahasiswa hubungan internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam tentang keterlibatan Rusia pada konflik Suriah khususnya pada tahun 2015-2018.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature Review

Konflik Suriah dianggap sebagai salah satu konflik sipil yang menjadi perhatian dunia, dikarenakan konflik Suriah diintervensi oleh Negara yang mempunyai pengaruh besar di dunia internasional seperti Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah, digunakan untuk membantu mempertahankan keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad sebagai presiden Suriah. Dukungan yang diberikan Rusia terhadap rezim Bashar Al-Assad, tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai dan dipenuhi. Berikut merupakan tujuh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bentuk dan tujuan intervensi Rusia di Suriah, dan dapat digunakan sebagai literature review pada penelitian.

Penelitian pertama ditulis oleh Ibrahim Noor yang berjudul “*Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah*” (Ibrahim Noor, 2014 : 1063-1078). Jurnal yang ditulis oleh Ibrahim Noor membahas bentuk dan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah menggunakan 1 teori dan 2 konsep yaitu; teori konflik (Galting), konsep intervensi (Marbun) yang menjelaskan mengenai bentuk intervensi Rusia dan konsep kepentingan nasional (Donald E. Netherchelin) yang menjelaskan tujuan intervensi Rusia di Suriah. Ibrahim Noor menyebutkan bahwa

Rusia mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam intervensinya di Suriah sebagai berikut :

- a) Melindungi kerjasama ekspor perdagangan senjata antara Rusia dan Suriah.
- b) Melindungi pangkalan militer Rusia di Tartus yang digunakan oleh Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah.

Ibrahim Noor menyebutkan bentuk-bentuk intervensi Rusia di Suriah, berikut merupakan bentuk intervensi Rusia pada konflik Suriah :

- a) Intervensi militer Rusia di Suriah dilakukan dengan mengirimkan sejumlah pasukan militer ke Suriah dan mengirimkan pasokan persenjataan ke Suriah.
- b) Intervensi diplomatik dilakukan Rusia dengan cara memveto hasil resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak keterlibatan AS dalam konflik Suriah.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Salam Alsaadi yang berjudul “*Russia’s Military Involvement in Syria : An Integrated Realist and Constructivist Approach*” (Salam Alsaadi, 2017 : 87-93). Jurnal ini membahas mengenai tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah dianalisis menggunakan teori konstruktif dan realis. Berdasarkan teori konstruktif dari Jackson dan Sorenson mengatakan politik domestik, kebutuhan ekonomi dan pandangan pemimpin Negara membentuk identitas Negara, yang kemudian menghasilkan kebijakan luar negeri. Politik domestik dan pandangan pemimpin Rusia membentuk identitas Rusia menjadi Negara anti barat dan hal tersebut, diimplementasikan kedalam kebijakan

luar negerinya. Rusia tidak ingin AS terlibat dalam konflik Suriah, sehingga pengaruh AS dapat diterima di Suriah dan membuat Rusia kehilangan salah satu Negara pendukung Rusia di Timur Tengah. Rusia mendukung pemerintah Suriah, terutama Bashar Al- Assad dikarenakan kebijakan luar negeri Rusia dalam membangun kembali pengaruhnya di dalam lingkungan internasional.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Adam Twardowski yang berjudul “*The Return of Novorossiya : Why Russia’s Intervention In Ukraine Expose The Weakness of International Law*”(Adam Twardowski, 2015 : 351-385). Penelitian ini membahas mengenai bentuk, tujuan dan legalitas intervensi Rusia pada konflik antara Rusia dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan *humanitarian intervention* sebagai konsep dalam menganalisis bentuk dan tujuan intervensi dan sudut pandang realis dalam menganalisa legalitas intervensi yang dilakukan Rusia. Dalam *humanitarian military* intervention terdapat prinsip R2P (*Responsibility to Protect*) yaitu prinsip yang mewajibkan setiap Negara untuk melakukan intervensi dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman genosida.

R2P digunakan Rusia sebagai bentuk intervensinya dengan Ukraina untuk melindungi masyarakat Rusia dari ancaman pasukan militer Ukraina. Twardowski menganalisa legalitas intervensi Rusia dengan Ukraina dari sudut pandang realis. Ancaman dari lingkungan internasional membuat Rusia memakai R2P sebagai tujuan intervensinya sehingga dapat dilegalkan. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu meskipun tetap membahas intervensi Rusia namun fokus konflik dan bentuk intervensi yang diambil berbeda, penelitian ini mengambil konflik Suriah dan *intervention by invitation*

Penelitian yang keempat yang ditulis oleh Dhvani Adhyatmika Nandanaardi yang berjudul “*Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012*” (Dhwani Adhyatmika Nandanaardi, 2014 : 141-155). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan luar negeri dan tujuan Intervensi Rusia pada konflik Suriah. Tujuan intervensi Rusia di Suriah dianalisis menggunakan *National Security Concept*, *National Security Strategy*, dan *Military Doctrine*. Dhvani menyebutkan tiga tujuan Rusia di Suriah yaitu mengembalikan pengaruh sebagai negara *great power*, melindungi investasi serta perdagangannya di Suriah dan menciptakan stabilitas keamanan dari ancaman terorisme ISIS di Suriah. Kebijakan luar negeri Rusia dibuat berdasarkan tujuan yang berusaha dicapai Rusia di Suriah. Kebijakan luar negeri Rusia untuk Suriah adalah melakukan veto untuk menolak keterlibatan AS, hal ini sesuai dengan tujuan rusia yaitu mengembalikan pengaruh sebagai Negara yang mempunyai pengaruh yang besar di dunia internasional.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Max Byrne yang berjudul “*Consent and the use of force: an examination of intervention by invitation as a basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen*” (Max Byrne, 2016 : 97-125). Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan legalitas intervensi yang dilakukan AS terhadap konflik sipil di Pakistan, Somalia dan Yaman. Penelitian ini menggunakan konsep *intervention by invitation* dalam menganalisis bentuk dan tujuan intervensi yang dilakukan AS. *Intervention by invitation* adalah salah satu bentuk intervensi yang dilakukan dengan cara persetujuan atau permintaan dari kepala pemerintahan yang berlegitimasi. AS mendapatkan persetujuan untuk mengintervensi Pakistan, Somalia dan Yaman. Sedangkan untuk menganalisis

legalitas intervensi yang dilakukan AS pada konflik sipil Pakistan, Somalia dan Yaman diatur dalam hukum internasional *Draft Articles on State Responsibility* (DASR) yang mengatur mengenai kewajiban setiap Negara dalam melakukan intervensi. DASR artikel 20 mengatur mengenai legalitas *intervention by invitation* menyatakan intervensi dinyatakan legal dengan adanya izin atau permintaan dari Negara yang berdaulat. Menurut Max Byrne terdapat kelemahan bentuk intervensi *intervention by invitation* yaitu intervensi tidak boleh melanggar *International Humanitarian Law* (IHL). Tujuan utama intervensi tidak boleh digunakan untuk tujuan genosida, Negara yang melakukan intervensi harus mengikuti aturan dari IHL jika tidak akan dikenakan sanksi internasional.

Penelitian yang keenam ditulis oleh Azmi Bishara dengan judul “*Russian Intervention in Syria : Geostrategy is Paramount*” (Azmi Bishara, 2015) penelitian tersebut membahas mengenai tujuan Rusia di Suriah dianalisis menggunakan pandangan *geostrategic*. Ditegaskan di dalam *paper* bahwa Rusia mendukung pemerintahan Bashar Al Ashad sebagai pemerintahan yang berdaulat di Suriah. Azmi Bishara mengasumsikan bahwa intervensi Rusia di Suriah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik Suriah. Azmi Bishara berpendapat bahwa ‘*power sharing*’ dapat menjadi langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik Suriah. Menurut Azmi Bishara terdapat tiga tujuan intervensi Rusia di Suriah yaitu:

1. Mempertahankan keberlangsungan pemerintahan rezim Bashar Al Assad di Suriah dari pihak oposisi dan ISIS. Intervensi militer yang dilakukan Rusia membuka peluang bagi penyelesaian konflik di Suriah

2. Menunjukkan diri sebagai Negara yang mempunyai kekuatan militer yang besar di dunia internasional.
3. Memperkuat diplomasi Rusia dengan Negara lain. Konflik sipil dapat dijadikan alasan sebuah Negara untuk melakukan hubungan diplomasi dengan Negara lain. Seperti hubungan diplomasi Rusia dan AS walaupun kedua Negara tidak pada kesepakatan yang sama tetapi Rusia dan AS mempertahankan hubungan diplomasinya demi menyelesaikan konflik Suriah.

Penelitian yang ketujuh ditulis oleh Foeke Johan Postman yang berjudul “*Show of force : Russian intervention in Syrian civil wars*” (Foeke J Postman, 2015 : 1-133). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dalam menganalisa kebijakan luar negeri Rusia di Suriah Foeke J, Postman menggunakan teori neorealis dan konstruktivisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*apakah neorealis dan konstruktivisme dapat menjelaskan kebijakan luar negeri Rusia pada konflik sipil Suriah?*”. Penelitian ini menjelaskan sudut pandang neorealis yang menyatakan sistem internasional mempengaruhi perilaku Negara, sementara konstruktivisme berpandangan bahwa perilaku Negara yang membentuk sistem internasional. Menurut Postman pandangan neorealis digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Rusia pada konflik Suriah. Hal ini sesuai dengan sikap Rusia dalam memamerkan kekuatan militernya di Suriah dan berusaha menjaga *balance of power*nya di Timur Tengah.

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian pertama, kedua, keempat, keenam dan ketujuh

menggunakan konsep dan teori yang berbeda untuk menganalisis fokus penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi. Penelitian terdahulu tidak menjelaskan mengenai kondisi terbaru intervensi yang dilakukan Rusia pada konflik Suriah. Penelitian ketiga dan kelima memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penulis. Penelitian ketiga menggunakan konflik antara Rusia dan Ukraina, sedangkan penelitian kelima menggunakan intervensi yang dilakukan AS. Penelitian terdahulu memiliki tema yang relatif serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Lebih spesifik, dalam penelitian ini akan menggunakan informasi terbaru mengenai konflik Suriah dan bentuk intervensi Rusia pada konflik Suriah dari tahun 2011 hingga 2018. Skripsi ini juga akan menganalisa lebih lanjut mengenai tujuan intervensi Rusia di Suriah berdasarkan kepentingan nasional Rusia. Ketujuh penelitian terdahulu dirangkum ke dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

NO	Nama Peneliti/ Aspek Penelitian	Ibrahim noor	Salam alsaadi	Adam Twardowski	Dhwani Adhyatmika Nandanaardi	Max Byrne	Azmi Bishara	Johan Postman
1	Topik penelitian	Intervensi Rusia pada konflik Suriah	Latar belakang intervensi Rusia	Hukum internasional pada intervensi Rusia di Krimea	Faktor keterlibatan Rusia pada konflik Suriah	Persetujuan melakukan <i>Intervention by invitation</i>	Tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah dilihat dari <i>geostrategi c</i>	Kebijakan luar negeri Rusia pada konflik Suriah
2	Metode penelitian	kualitatif	Observasi kebijakan luar negeri Rusia	Studi kasus Intervensi Rusia di Krimea	Studi kasus Intervensi Rusia	Studi dokumen, Studi kasus	Studi kasus	Studi kasus kualitatif
3	Konsep/ teori	Teori konflik (Galting), konsep intervensi (Marbun), konsep kepentingan nasional (Donald N.)	Konstruktivis (Jackson dan Sorensen)	R2P (<i>Responsibility to Protect</i>)	Military doctrine, Security concept, <i>National Security Strategy</i> ,	<i>Draft Article State Responsibility</i> (DASR)	<i>Geostrategi c</i>	Neorealis dan Konstruktivisme
4	Paradigma	Realis	Realis	Realis	Realis	Realis	Realis	Neorealis dan konstruktivisme
5	Model penelitian	Analisis bentuk dan tujuan intervensi Rusia	Analisis latar belakang penyebab intervensi	Analisis Intervensi Rusia pada hukum Internasional	Analisis data kebijakan luar negeri Rusia di Suriah, Analisa kasus intervensi Rusia di Suriah	Analisis faktor-faktor dilegalkannya <i>intervention by invitation</i>	Analisis tujuan intervensi Rusia dilihat dari sudut pandang <i>geostrategi c</i>	Analisa data melalui teori hubungan internasional

6	Kesimpulan	Rusia melakukan 2 jenis intervensi yaitu militer dan diplomasi	Intervensi disebabkan oleh ide, norma internasional dan kepentingan material	Hukum Internasional mempunyai banyak kelemahan	Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan kepentingan nasional Rusia di Suriah.	<i>Intervention by invitation</i> diperbolehkan masuk dalam sebuah negara jika ada permintaan bantuan militer dari kepala negara yang berkuasa	Konflik Suriah menjadi perebutan power secara geo strategi antara actor-actor power.	Neorealis dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku Rusia pada konflik Suriah.
---	------------	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 2.1 Perbandingan Jurnal

Sumber : Data diolah oleh penulis dan diperoleh dari berbagai Jurnal Azimi Bishara(2015),Max Bryn(2016),Salam Alsadi &Johan Postman(2017)

2.2. Landasan Konseptual

Bab ini menjelaskan mengenai konsep yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian. Bab ini terbagi kedalam empat bagian, bagian pertama dan kedua menjelaskan konsep yang digunakan untuk menganalisis bentuk intervensi Rusia di Suriah yaitu; *humanitarian military intervention* dan *intervention by invitation*. Bagian ketiga dan keempat menjelaskan mengenai konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Bagian ini digunakan untuk menganalisis tujuan intervensi Rusia di Suriah. Berikut merupakan penjelasan mengenai konsep yang digunakan penulis di dalam penelitian.

2.2.1. *Military Intervention*

Intervensi militer merupakan penggunaan kekuatan militer pada lintas batas Negara oleh Negara ataupun organisasi internasional tertentu yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan suatu masyarakat tertentu dan menegakan HAM. Intervensi militer dilakukan menggunakan kekuatan militer dimana kekuatan personel militer dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara terlibat didalamnya. Intervensi militer dapat digunakan untuk membantu pemerintahan yang berdaulat maupun kelompok oposisi yang menentang pemerintahan. Dalam perkembangannya intervensi militer terbagi dalam 10 pola intervensi militer, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Martin Ortega, 2001 : 5-7) :

1. *Imperialistic pattern*, merupakan pola intervensi militer yang dilakukan oleh Negara besar dalam konflik sipil Negara lain. Intervensi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, mencapai kepentingan nasional dan meningkatkan pengaruh pada Negara yang diintervensi maupun pada lingkup internasional. Intervensi militer pola ini terjadi karena Negara tidak menginginkan perubahan kebijakan politik luar negeri yang tidak menguntungkan Negaranya.
2. *Colonial*, merupakan pola intervensi militer yang menekankan pada kepentingan nasional Negara *colonial* terhadap Negara lemah
3. *Balance of power*, intervensi militer ini digunakan untuk memperbaiki keseimbangan sistem internasional dan mencegah perubahan dari sistem multipolar menjadi hegemoni yang dikuasai satu Negara.

4. *Ideological*, pola intervensi militer yang bertujuan merubah sistem politik sebuah Negara dengan alasan penyebaran ideologi
5. *Self-determination*, merupakan pola intervensi militer yang digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang dijajah oleh Negara lain.
6. *Self-defence*, merupakan pola intervensi militer yang digunakan untuk mencegah perkembangan konflik.
7. *Cold war pattern intervention*, pola intervensi ini digunakan antara tahun 1945-1990, intervensi ini dilakukan dengan mempengaruhi wilayah yang dianggap mempunyai pengaruh.
8. *Humanitarian intervention* merupakan pola intervensi yang menggunakan kekuatan militer dengan alasan memberikan perlindungan masyarakat.
9. *Collective intervention*, merupakan intervensi militer yang dilakukan atas keputusan bersama dan bertujuan untuk memelihara keamanan lingkungan internasional.
10. *Punitive intervention*, merupakan pola intervensi militer yang digunakan untuk tujuan pemberian hukuman kepada Negara yang dianggap melakukan tindakan genosida.

Berdasarkan pola intervensi di atas, maka pola intervensi militer Rusia adalah *Imperialistic pattern*. Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah berlandaskan memenuhi kepentingan nasional di Suriah dan menyebarkan pengaruh Rusia dalam lingkup internasional. Konflik Suriah menjadi salah satu isu internasional, sehingga banyak keterlibatan Negara besar seperti AS, Rusia, Iran dan Tiongkok. Keterlibatan Negara ini membawa tujuan dan pengaruhnya masing-masing di dalam konflik Suriah. Keterlibatan banyak Negara di Suriah

menyebabkan kekhawatiran Rusia akan pengaruh AS masuk dan merubah kebijakan, oleh karena itu Rusia mengintervensi Suriah agar kebijakan luar negeri Suriah menguntungkan Rusia.

Intervensi militer yang dilakukan suatu Negara tentunya memiliki batasan, sehingga intervensi militer yang dilakukan tidak mengancam kedaulatan suatu Negara. Intervensi militer yang dilakukan di Negara lain dapat dinyatakan legal dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku menurut pengecualian sebagai berikut (Adolf Hualala, 2002 : 34-35) :

1. Suatu Negara telah diberikan hak-hak intervensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh Negara untuk meminta perlindungan
2. Perjanjian non-intervensi yang dilanggar suatu Negara, maka Negara lain berhak untuk mengintervensi.
3. Negara melanggar ketentuan hukum internasional yang berlaku, jika sebuah Negara melakukan tindakan genosida terhadap masyarakatnya maka Negara tersebut berhak untuk mengintervensi.
4. Jika ada warga negara yang diperlakukan tidak adil di Negara lain maka Negara tersebut berhak untuk melakukan tindakan intervensi.
5. Adanya keputusan bersama dari organisasi internasional untuk mengintervensi konflik sipil di suatu Negara
6. Adanya permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas dari kepala pemerintahan yang berdaulat untuk mengintervensi konflik Negeranya.

Berdasarkan klasifikasi di atas maka intervensi militer yang dilakukan Rusia di Suriah dinyatakan legal dan memenuhi ketentuan hukum internasional. Intervensi Rusia di Suriah memenuhi ketentuan keenam yaitu adanya permintaan

yang sungguh-sungguh dari kepala pemerintahan yang berdaulat. Ketentuan keenam tersebut sering digunakan Negara sebagai alasannya mengintervensi konflik sipil Negara lain. Pemerintah Bashar Al-Assad secara tegas dan bersungguh-sungguh meminta Rusia untuk membantu mempertahankan keuasannya di Suriah melawan serangan dari pihak oposisi dan terorisme ISIS.

2.2.2. Intervention By Invitation

Intervention by invitation adalah intervensi yang dilakukan atas izin ataupun permintaan dari kepala Negara yang berkuasa pada saat itu (Christopher J, 2003:731-732). *Intervention by invitation* umumnya banyak terjadi ketika Negara mengalami konflik sipil dan Negara tidak dapat mengendalikan konflik sipil sehingga Negara meminta untuk diintervensi. Konflik sipil menyebabkan permasalahan pada tingkat internasional seperti *refugee* dan *food security*. *Intervention by invitation* digunakan ketika konflik sipil suatu Negara tidak dapat diselesaikan oleh Negara yang sedang berkonflik, sehingga Negara asing perlu terlibat dalam membantu penyelesaian konflik sipil.

Negara yang diundang untuk melakukan intervensi pada konflik sipil secara fundamental, harus dengan seizin kepala pemerintah yang berlegitimasi pada saat konflik sipil terjadi. Intervensi yang dilakukan tanpa izin pemerintah yang berlegitimasi, dianggap melanggar kedaulatan Negara dan intervensi tersebut dinyatakan ilegal. *Intervention by invitation* dikatakan legal jika terdapat izin atau permintaan dari Negara yang akan diintervensi serta tujuan utama intervensi tidak boleh digunakan dalam upaya genosida, namun berupaya dalam

mencapai kepentingan bersama termasuk upaya dalam berkerjasama memberantas terorisme (Karine Bannelier, 2016 : 745).

Dalam melaksanakan *intervention by invitation* Negara yang diundang untuk mengintervensi akan dianggap sebagai aliansi dari Negara yang mengundang intervensi, dan tujuan intervensi harus sesuai dengan keinginan Negara yang diintervensi. *Intervention by invitation* seperti yang kita ketahui di atas dilakukan ketika adanya permintaan dari kepala Negara yang berdaulat untuk mengintervensi konflik sipil Negaranya, namun terdapat ketentuan sejauh mana Negara yang mengintervensi dapat terlibat dalam konflik sipil dilihat dari tingkat keparahan konflik sipil. Berikut merupakan tiga kategori tingkat keparahan dari konflik sipil (Christopher J, 2003 : 746-749) :

- a) *Rebellion* adalah tahap awal konflik sipil pada suatu Negara dimulai, pemerintah dapat mengendalikan konflik sipil. Penyelesaian konflik sipil adalah kewajiban pemerintah Negara yang berdaulat. Dalam tahap ini Negara yang tidak terlibat konflik sipil diharuskan untuk menahan haknya dalam memberikan bantuan kepada pemerintahan yang berdaulat dan tidak diperkenankan dalam memberikan bantuan kepada pihak oposisi
- b) *Insurgency* dalam tahap ini pemerintah telah kehilangan sebagian dari kekuasaannya dari pihak oposisi. Pada tahap ini bantuan kepada pemerintah dapat dilakukan
- c) *Beligerency* dalam tahap ini pihak oposisi telah menguasai lebih atau sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah sudah tidak dapat mengendalikan konflik sipil.

Menurut pemaparan di atas konflik Suriah masuk pada tahap *belligerency* dimana pemerintah Suriah tidak dapat mengendalikan konflik dan kehilangan daerah kekuasaannya. Pihak oposisi telah menguasai sebagian wilayah di Suriah, sehingga keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad terancam. Konflik Suriah yang tidak bisa dikendalikan, mengakibatkan pemerintah Suriah meminta Rusia untuk mengintervensi konflik sipil Negeranya. Intervensi militer Rusia di Suriah adalah *intervention by invitation* dibuktikan dengan adanya permintaan pemerintah Suriah kepada Rusia untuk mengintervensi konflik sipil di Suriah.

Rusia mengirimkan angkatan udara dan pasukan bersenjataanya sejumlah pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus dan Latakia pada september 2015. Intervensi Rusia di Suriah membantu presiden Bashar Al Assad mengendalikan konflik Suriah serta memberantas terorisme ISIS. Rusia mengirmkan penjelasan kepada dewan keamanan PBB bahwa intervensi militer yang dilakukan Rusia adalah upaya untuk memberantas terorisme di Suriah (Karine Bannelier, 2016 : 761). Menurut Christopher J. Le Mon terdapat tiga aspek legalitas dari *intervention by invitation* sebagai berikut (Christopher J. Le Mon, 2003 : 742-750)

- a) *Pertama* penguasa dalam kegiatan militer dan paramiliter
- b) *Kedua* jenis konflik Intervensi Rusia di Suriah adalah jenis konflik *belligerency*
- c) *Ketiga* izin dari pemerintah yang berdaulat, intervensi Rusia merupakan permintaan dari pemerintah Suriah.

2.2.3. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dianggap sebagai salah satu kunci politik internasional, hal ini menunjukkan pentingnya pengambil keputusan dimana

pemerintah mengelola hubungan dengan Negara lain. Kebijakan luar negeri selalu dikaitkan dengan isu '*high politic*' yang berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan Negara. Masuknya neoliberal menyebabkan perubahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya dipengaruhi oleh isu keamanan namun keadaan ekonomi, keadaan politik suatu Negara dan ideologi suatu Negara mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Aktor kebijakan luar negeri dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya berasal dari kepala pemerintahan namun menteri luar negeri, menteri pertahanan dan diplomat ikut serta dalam proses tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh globalisasi dan hubungan saling ketergantungan yang kompleks. Perkembangan ini memperdalam jangkauan interaksi antara Negara. Perbedaan antara dalam negeri dan luar negeri serta *high* dan *low politic* menjadi kabur. Politik luar negeri dan politik dalam negeri menjadi sulit dibedakan. Proses pembuatan kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh Negara namun *NGO (Non-governmental Organization)*, grup teroris dan organisasi internasional mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri (Steve Smith, Tim Dunne & Amelia Hadfield, 2016 : 113).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri terdapat tiga level analisis penyebab perang yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz, sebagai berikut (Kenneth N. Waltz, 1993 : 16-18)

1. *pertama individual decision-maker*, pembuatan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh perilaku individu dengan adanya kepentingan pribadi, psikologi individu dan disposisi individu mempengaruhi manusia untuk

memulai konflik. Level ini mengacu kepada perilaku manusia sebagai penyebab perang dimulai.

2. *kedua nation-state level* yang dipengaruhi oleh struktur birokrasi, jenis pemerintahan dan bentuk Negara. Fokus dari level ini adalah faktor-faktor internal dalam suatu negara seperti dasar-dasar ideologi. Misalnya perbedaan pendapat mengenai kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan sistem demokrasi atau otokratis. Pada konflik Suriah kita dapat melihat bahwa penyebabnya adalah perubahan sistem perekonomian Suriah yang mengacu kepada neoliberal. Pemerintah Suriah berfokus kepada investasi asing dan pembangunan real estate, sementara sektor agriculture yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Suriah diabaikan oleh pemerintah Suriah. Kegagalan kebijakan perekonomian, membuat kesejahteraan masyarakat Suriah semakin menurun dan menyebabkan rasa kepercayaan masyarakat Suriah terhadap pemerintah Suriah semakin menurun.
3. *ketiga systemic level* yang dipengaruhi oleh *balance power* dari sistem internasional, kapitalisasi global dan jaringan ketergantungan setiap Negara. Konflik menjadi lebih sulit diselesaikan disebabkan situasi lingkungan internasional yang rumit.

Berdasarkan tiga level analisis penyebab perang yang dipaparkan oleh Kenneth Waltz di atas, konflik sipil Suriah termasuk kedalam dua level penyebab perang yaitu *nation state level* dan *systemic level*. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Suriah yang tidak tepat, menyebabkan ketidakberpihakan masyarakat

Suriyah terhadap pemerintah Suriyah karena dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat.

Kenneth Waltz berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah hubungan antara Negara berserta dengan perilakunya dalam menghadapi permasalahan internasional. (Asrudin & Mirza Jaka Suryana, 2009 : 26). Kebijakan luar negeri tidak hanya digunakan dalam berhubungan dengan Negara lain melainkan kebijakan tersebut harus di implementasikan dalam merespon masalah internasional. Kebijakan luar negeri juga berfungsi sebagai alat dalam menentukan bagaimana sikap Negara dalam menghadapi masalah internasional.

Kebijakan luar negeri menjelaskan mengenai maksud dan tujuan sebuah Negara dalam menghadapi lingkungan internasional. Lingkungan internasional dinilai penting karena menjadi salah satu penentu apakah Negara berhasil memenuhi kebutuhan nasional. Kebijakan luar negeri adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional namun, keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari faktor lingkungan internasional. Kehadiran Negara lain dalam suatu permasalahan internasional akan membuat Negara terbantu ataupun terhambat dalam memperoleh kepentingannya. Seperti contohnya Rusia tentunya mempunyai kebijakan luar negerinya sendiri.

Kebijakan luar negeri Rusia digunakan dalam berhubungan dengan Negara lain sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Dalam menangani permasalahan internasional Rusia menggunakan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan Rusia dalam menanggapi permasalahan internasional. Rusia terlibat dalam konflik Suriyah melalui kebijakan intervensi militernya ke pada

tahun 2015. Kenneth Waltz menyatakan bahwa, setiap Negara mempunyai tujuan tersendiri pada lingkungan internasional. Intervensi Rusia mempunyai kepentingan nasional di Suriah yang harus dipenuhi.

Menurut pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Rusia mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Intervensi militer yang dilakukan Rusia bertujuan untuk membantu Suriah mempertahankan keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad sebagai kepala pemerintah yang berdaulat di Suriah. Rusia mendukung pemerintahan presiden Bashar Al- Assad, dikarenakan Rusia berpandangan bahwa Bashar Al- Assad adalah pemimpin Suriah yang dapat mengendalikan konflik Suriah dan belum tentu pemimpin Suriah selanjutnya akan pro dengan kebijakan Rusia. Selain itu Rusia dan presiden Bashar Al-Assad mempunyai hubungan kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi dan militer, menjadikan Suriah *partner* kerjasama yang menguntungkan bagi Rusia.

Kebijakan intervensi militer yang dilakukan Rusia di Suriah mempunyai tujuan dalam menunjukkan kekuatan militer Rusia di dunia internasional. Rusia berniat mengklaim statusnya kembali sebagai Negara yang berpengaruh di dalam dunia internasional. Berdasarkan kebijakan di atas, dapat dilihat bahwa Rusia menginginkan adanya pembagian pengaruh yang tidak di dominasi oleh kekuatan unipolar yaitu AS dan berupaya mengimbangi dengan membentuk sistem dunia yang multipolar.

Rusia tidak ingin pengaruh AS masuk dalam konflik Suriah dan merusak Suriah sehingga mengakibatkan kerugian bagi Rusia karena kehilangan

pengaruhnya di Timur Tengah. Masuknya AS dalam konflik Suriah membuat Rusia kesulitan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di Suriah sehingga kepentingan nasional Rusia di Suriah sulit dipenuhi.

2.2.3. Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam mengukur suatu Negara mencapai kebutuhannya. Kepentingan nasional suatu Negara dapat berupa ekonomi, militer dan ideologi. Kepentingan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur perilaku suatu Negara terhadap Negara lain dalam mengejar kebutuhan dan kekuasaannya. Kaum realis menganggap kepentingan nasional adalah *power* yang digunakan Negara untuk mengontrol Negara lain. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau (Theodore A. Coulumbis & James H. Walfe, 1986 : 115) adalah,

“Kemampuan minimum Negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas, fisik, politik dan kultural dari gangguan Negara lain, Dari tinjauan diatas para pemimpin Negara menurunkan kebijakan spesifik bagi Negara lain yang sifatnya kerjasama maupun konflik”.

Menurut pandangan Morgenthau di atas, kepentingan nasional adalah hal yang paling penting dan mendasar bagi setiap Negara dalam melindungi dan mempertahankan Negeranya dari ancaman. Kepentingan nasional juga dapat dilakukan dengan cara berkerjasama maupun berkonflik dengan Negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi Negara. Kepentingan nasional merupakan dasar

bagi politik luar negeri setiap Negara dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah politik luar negeri setiap Negara.

Kepentingan nasional digunakan sebagai alat dalam mengukur keberhasilan sebuah Negara dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan Negara dikatakan berhasil jika masyarakat di Negara tersebut terpenuhi semua kebutuhan hidup dan hak-haknya dijamin oleh Negara. Dalam berhubungan dengan Negara lain para pembuat keputusan yaitu presiden dan menteri menggunakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional dari berbagai Negara membuat pembuat keputusan sulit untuk menentukan kebijakan luar negeri yang diambil dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh konflik Suriah yang melibatkan berbagai *actor state* seperti Rusia, AS, Tiongkok dan Iran yang terlibat memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing menyebabkan konflik Suriah sulit diselesaikan. Kepentingan nasional yang berbeda menyebabkan kebijakan luar negeri yang berbeda dalam menyikapi konflik Suriah. Dalam Jurnal (Donald E. Nuechterlein, 2009: 248) terdapat empat jenis dimensi kepentingan nasional yaitu:

1. Dimensi pertahanan, adalah kepentingan Negara untuk melindungi suatu Negara dan warga Negaranya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari Negara lain terhadap sistem pemerintahan.
2. Dimensi ekonomi, kepentingan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi Negara dan meningkatkan perekonomian Negara melalui kerjasama hubungan ekonomi dengan Negara lain.

3. Dimensi politik, adalah kepentingan yang ingin diwujudkan pemerintah untuk mempertahankan sistem politik Negeranya dan lebih jauh untuk melakukan perluasan politiknya ke Negara lain.
4. Dimensi ideologi, kepentingan Negara untuk melindungi nilai-nilai ideologi Negeranya dari ancaman ideologi Negara lain.

Sedangkan menurut Daniel S. Papp terdapat tiga aspek kepentingan nasional seperti aspek ekonomi, aspek ideologi, dan aspek militer (Daniel S. Papp, 1988 : 32) yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi, adalah salah satu faktor kepentingan nasional yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dalam memajukan sektor perindustrian dan perdagangan Negara. Salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian sebuah Negara adalah dengan mendapatkan kekayaan alam dari negara lain. Kekayaan alam terutama minyak bumi merupakan sumber energi paling penting karena energi digunakan dalam kebutuhan perindustrian, oleh karena itu Negara dengan penghasilan minyak bumi yang besar mendapatkan *power* di dunia internasional (Hans J. Morghnthau, 2010 : 141). Sumber energi terutama minyak dibutuhkan oleh Negara dalam memenuhi kebutuhan industri, oleh karena itu minyak dianggap penting oleh Negara. Pentingnya kebutuhan akan minyak bumi mengakibatkan terjadinya konflik akibat perebutan minyak bumi di Timur Tengah. Rusia mempunyai kepentingan ekonomi yang berusaha di capai di Suriah. Rusia mendukung pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah dikarenakan adanya investasi

melalui perusahaan milik Rusia di Suriah yang bergerak di bidang energi seperti *Tafneft*, *North-Western Oil Group*, *Gazprom* dan *Soiuzftegaz*. Rusia menyatakan bahwa investasi yang dikeluarkan untuk perusahaan tersebut mencapai 20 milyar US\$ dolar (dr.Indrani Talukdar, 2016: 3-4).

2. Aspek Keamanan dan pertahanan, kepentingan nasional dalam bidang keamanan dan pertahanan dinilai sangat penting bagi suatu Negara karena keamanan merupakan suatu faktor penentu keberhasilan Negara dalam mempertahankan keutuhan Negara dan kesejahteraan masyarakat. Kekuatan suatu Negara dilihat dari segi keamanan dan pertahanannya. Keamanan dan pertahanan suatu Negara yang baik akan menciptakan *balance of power* dari sistem internasional. Dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu Negara, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan serta teknologi militer dan meningkatkan kualitas pangkalan militer. Dalam konflik Suriah tentunya Rusia mempunyai kepentingan dalam bidang militer salah satu contohnya adalah pelabuhan pangkalan militer di Tartus yang dimiliki Rusia sejak masa pemerintahan Uni Soviet. Pangkalan Tartus penting bagi Rusia dikarenakan satu-satunya pangkalan militer Rusia diluar kewasannya dan terdapat banyak kapal induk milik Rusia yang digunakan sebagai pertahanan militernya di Timur Tengah. Tartus juga menjadi penting karena pemasokan senjata ke Suriah melauai pangkalan militer tersebut.
3. Aspek Ideologi merupakan alat bagi sebuah Negara dalam memberikan pengaruhnya ke Negara lain. Ideologi digunakan Rusia dalam memberikan pengaruhnya di Suriah. Rusia berusaha memberikan

pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui Suriah. Suriah memiliki letak geografis yang strategis *shatterbelt* (ditengah kawasan) menjadi alasan kenapa Rusia menginginkan penyebaran ideologi di Suriah. Penyebaran ideologi Rusia di Suriah digunakan sebagai upaya Rusia menghalau pengaruh AS berkembang di Timur Tengah.

Menurut Nincic terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional (Miroslav Nincic, 1992 : 157). Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama dari pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional haruslah bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan dipertimbangkannya ketiga hal utama tersebut maka aktor-aktor hubungan internasional akan berusaha melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan Negara melalui kepentingan nasional.

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Negara tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional (Baylis John &Smith Steve, 2001 : 210). Hal tersebut terkait dengan eksistensi Negara dan bagaimana Negara dapat melangsungkan kehidupannya agar tercakupi. Maka segala sesuatu yang mengambil bagian dalam berdirinya sebuah Negara harus dicapai, diseimbangkan dan ditingkatkan agar keberadaannya diakui di dunia internasional.

Dengan adanya kepentingan nasional, maka interaksi lingkungan internasional akan selalu menjadi kebutuhan setiap Negara. Kepentingan nasional dapat di definisikan sebagai “*what’s good for nation as a whole in international affairs*” maksudnya disini adalah kepentingan nasional dibuat untuk kebaikan Negara. Suatu sikap atau kebijakan yang dianggap menguntungkan suatu Negara dalam berhubungan dengan Negara lain bisa dikatakan sebagai kepentingan nasional. K.J Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam 3 klasifikasi sebagai berikut (K.J Holsti, 1987 : 723) :

- a) *Core values* adalah kepentingan nasional yang bersifat vital karena berkaitan dengan eksistensi dan keamanan nasional suatu Negara. Kepentingan ini harus dilindungi dengan cara apapun, contohnya menjamim kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional dan melegalkan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sesuai dengan wilayah tersebut.
- b) *Middle-range objectives*, adalah kepentingan nasional menyangkut kebutuhan Negara untuk memperbaiki derajat perekonomian. Kepentingan ini berkaitan dengan dukungan dari aliansi, mencari peluang pembangunan perekonomian dengan berkerjasama antar Negara, dominasi wilayah regional dan ekspansi serta pembentukan institusi-institusi internasional
- c) *Long-range goals* merupakan kepentingan nasional yang berupa rencana dan pandangan mengenai organisasi politik, ideologi, sistim

internasional, hukum internasional dan peran Negara dalam dunia internasional

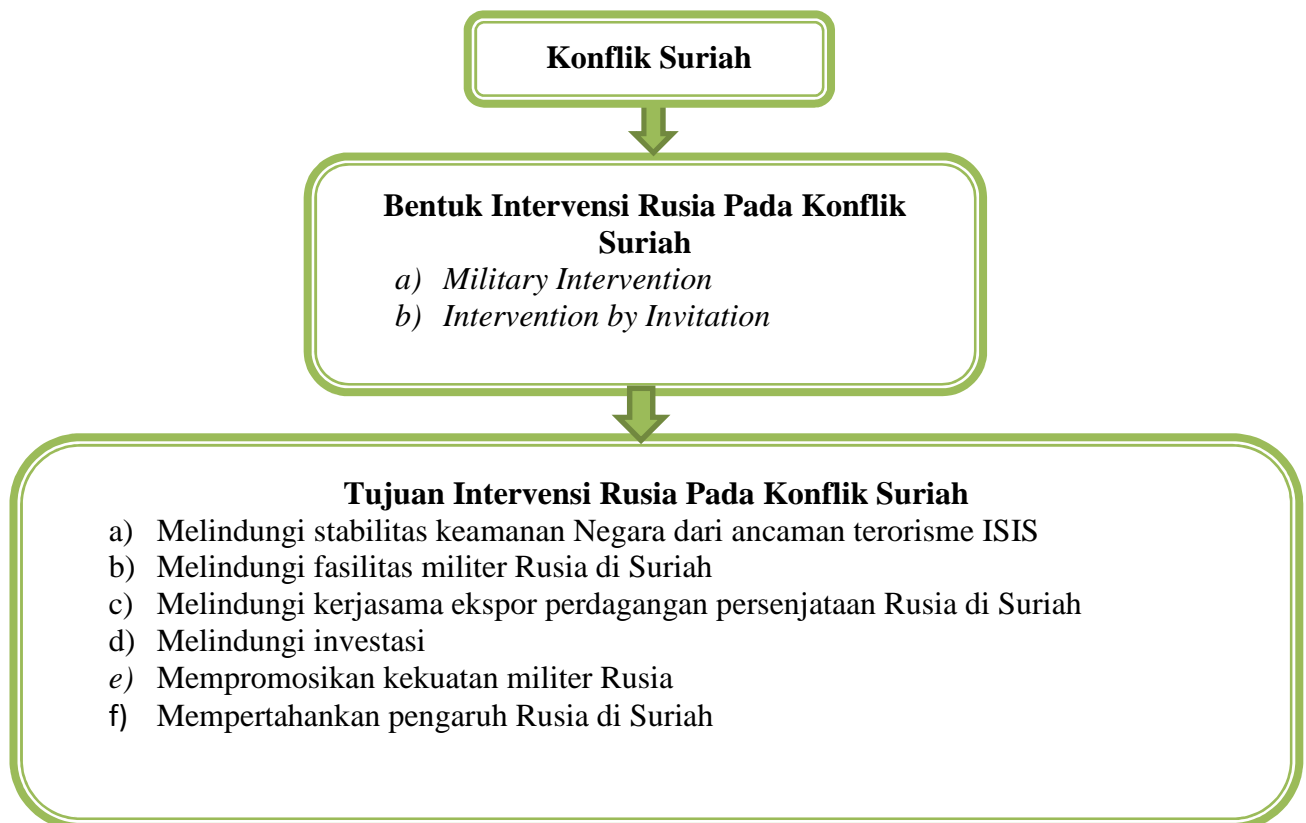
Berdasarkan klasifikasi kepentingan nasional di atas, kepentingan nasional Rusia di Suriah masuk tergolong dalam dua klasifikasi kepentingan nasional oleh K.J Holsti. Tujuan intervensi Rusia dilakukan atas dasar kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan pertahanan Rusia di Suriah tergolong dalam klasifikasi *core values*, dengan adanya tujuan pertahanan yang ingin dicapai Rusia di Suriah. Tujuan pertahanan yang harus dicapai adalah memberantas terorisme yang mengancam stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan merupakan kepentingan nasional yang penting dan harus dipenuhi demi menjaga keamanan dan eksistensi sebuah Negara.

Kepentingan ekonomi terklasifikasi dalam *Middle-range objectives*, dimana kerjasama ekonomi yang dilakukan Rusia di Suriah membantu pertumbuhan ekonomi Rusia. Sedangkan kepentingan politik Rusia di Suriah merupakan *long range objective* dimana kepentingan politik yang berusaha dicapai berupa rencana jangka panjang Rusia untuk .

2.3. Kerangka Pemikiran

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik sipil yang sulit diselesaikan, melihat banyak Negara terlibat di Suriah. Salah satu Negara yang memiliki peran penting dalam konflik Suriah adalah Rusia, dibuktikan dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintah Suriah sejak konflik Suriah dimulai. Dukungan

Rusia pada pemerintah Suriah secara nyata ditunjukkan dengan intervensi menggunakan kekuatan militer pada tahun 2015 atas permintaan dari presiden Suriah, Bashar Al Assad. Kedatangan Rusia ke Suriah tentunya memiliki tujuan tersendiri yang harus dipenuhi. Apabila digambarkan dalam skema di bawah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji pembahasan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan kejadian yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang saat ini terjadi.. Pada dasarnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Convelo G. Cevilla, 1993: 72)

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian yang menjadikan penelitian lebih terarah. Moleong, seorang peneliti kualitatif, menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif bagi peneliti (Sudarto, 1995 : 63-64) . Hal itu ditujukan agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun. Fokus penelitan

membantu peneliti memilih data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan penjabaran di atas penulis menyimpulkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a) Bentuk intervensi Rusia pada konflik Suriah dilihat dari
 - *Military intervention*
 - *Intervention by invitation*
- b) Tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah dilihat dari upaya pada :
 - Melindungi stabilitas keamanan Negara dari ancaman terorisme (ISIS)
 - Melindungi fasilitas militer Rusia di Suriah
 - Melindungi kerjasama ekspor perdagangan persenjataan
 - Melindungi investasi Rusia di Suriah
 - Mempromosikan kekuatan militer Rusia
 - Mempertahankan pengaruh Rusia di Suriah

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis-jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui situasi aktual ketika peristiwa terjadi seperti hasil wawancara, observasi dan kuisisioner. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen (Sugiono, 2012 : 164). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder mengenai bentuk dan tujuan Rusia pada konflik Suriah tahun 2015-2018.

3.4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2012 : 224) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi pustaka adalah data yang dipublikasikan kepada masyarakat umum dan diperoleh melalui buku, jurnal, majalah dan koran. Pada penelitian ini data diperoleh menggunakan browsing internet dan berkunjung ke perpustakaan FISIP UNILA.
- b) Studi dokumentasi adalah data yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum dan diperoleh dari dokumen, foto dan bahan statistik. Pada penelitian ini data diperoleh melalui dokumen statistik yang dikeluarkan oleh SIPRI dan *tradingeconomic*

3.5. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan, aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2012: 246). Aktivitas dalam menganalisis data dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- a) Reduksi data berarti merangkum sesuai dengan tema dan polanya dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data
- b) Penyajian data penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*
- c) Penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab gambaran umum, penulis akan memaparkan mengenai kondisi umum Suriah sebelum dan saat konflik sipil Suriah berlangsung. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konflik Suriah, bab ini dibagi menjadi lima bagian, *pertama* membahas mengenai sejarah pemerintahan Suriah yang menjelaskan kondisi pemerintahan Suriah dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap kelompok masyarakat Sunni, Suriah. Bagian *kedua* menjelaskan sejarah konflik Suriah antara pemerintah Suriah, pihak oposisi dan ISIS. Bagian *ketiga* membahas mengenai sejarah intervensi yang dilakukan Rusia di Ossetia Selatan dan Ukraina. Bagian keempat menjelaskan mengenai sejarah intervensi militer Rusia di Suriah tahun 2015-2018 dan bagian *kelima* membahas mengenai dinamika kerjasama antara Rusia dan Suriah.

4.1. Sejarah Pemerintahan Suriah

Suriah merdeka pada tahun 1946 dari jajahan Inggris dan Perancis, Pasca kemerdekaan Suriah mengalami pergolakan politik dalam negeri yang cukup signifikan. Setelah kemerdekaan, pemerintahan Suriah dikuasai oleh kelompok elit konserfatif Sunni. Pemerintahan Suriah yang dikuasai kelompok elit konserfatif Sunni mengalami ketidakstabilan politik dikarenakan perebutan

kekuasaan antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah pada pemerintahan Suriah. Ketidakstabilan politik memicu adanya kudeta militer yang dilakukan oleh Husni Zaim yang berasal dari kelompok Syiah, keberhasilan Husni dalam merebut kekuasaan dalam pemerintahan Suriah menjadikannya presiden Suriah.

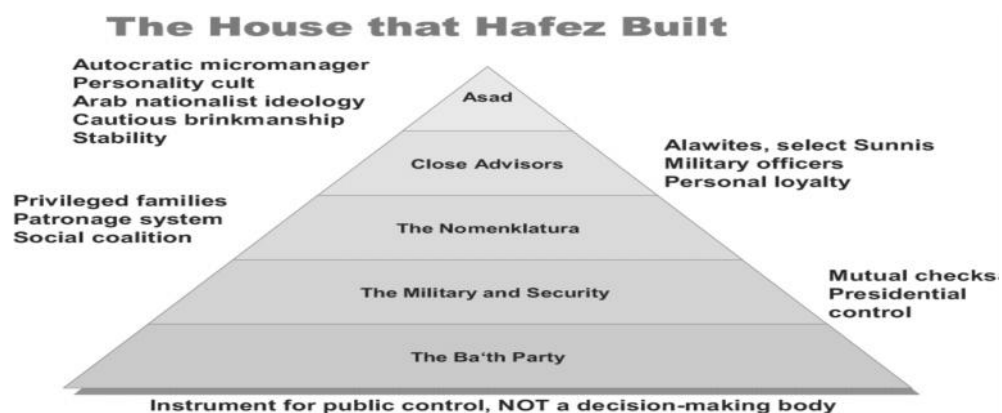
Pemerintahan Husni Zaim cenderung diktaktor, dengan mengasingkan pendukung kelompok elit konserfatif Sunni dari jajaran pemerintahannya dan mengistimewakan kelompok masyarakat yang mendukung pemerintahan Husni Zaim. Diskriminasi yang dialami kelompok Sunni menyebabkan perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah berkembang di Suriah. Politik dalam negeri yang tidak stabil menyebabkan perebutan kekuasaan antara kelompok masyarakat Suriah sehingga pemerintahan Husni zaim hanya bertahan selama 5 bulan.

Kudeta militer yang dilakukan oleh Hashim Al-Attasi mengakhiri masa kepemimpinan Husni Zaim di Suriah. Presiden Suriah kemudian digantikan oleh Hashim Al-Attasi yang memimpin Suriah dari Desember 1949 – Desember 1951. Dalam kurun waktu 1951-1971 Suriah kerap kali mengalami pergantian kekuasaan, yang disebabkan situasi politik dalam negeri yang tidak stabil dan terjadi perpecahan antara kelompok masyarakat Sunni dan Syiah.

Kepemimpinan Suriah kemudian digantikan oleh Hafez Al-Assad yang menjadi presiden terkuat sepanjang sejarah Suriah pada tahun 1971, dikarenakan kepemimpinannya yang berlangsung cukup stabil dan berlangsung seumur hidup. Hafez Al-Assad adalah presiden Suriah yang berasal dari kelompok minoritas Allawite, oleh karena itu kelompok ini menerima perlakuan istimewa dari rezim berkuasa. Pemerintahan era Hafez cenderung stabil karena didukung oleh partai politik Ba'ath yang pengaruhnya diterima oleh masyarakat Suriah, terutama

kelompok masyarakat minoritas Suriah seperti Allawite. Partai Ba'ath diterima pengaruhnya oleh masyarakat minoritas dikarenakan ideologi yang ditanamkan memberikan keadilan bagi kelompok minoritas. Ideologi yang ditanamkan dalam partai Ba'ath adalah ideologi nasionalisme Arab, sekularisme dan nasionalis. Ideologi ini menyebutkan agama sebagai tatanan sosial yang korup, opresif dan mengeksploitasi kaum minoritas. Tujuan partai Ba'ath adalah untuk memberikan keadilan perekonomian kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok minoritas Allawite, oleh karena itu partai ini mendapat dukungan dari kelompok masyarakat Allawite hingga saat ini.

Partai Ba'ath dan kelompok Allawite mempunyai hubungan yang cukup erat dalam sistem pemerintahan Suriah, dikarenakan kelompok Allawite didukung oleh ideologi yang dimiliki partai Ba'ath. Partai Ba'ath digunakan sebagai alat dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Hafez Al-Assad. Sistem pemerintahan era presiden Hafez Al-Assad dibuat oleh presiden dan untuk presiden, hal ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut (Elline Vessen, 2014 :34) :



Gambar 4.1 Sistem pemerintahan Hafez AL-Assad

Sumber : Elline Vessen (2014)

Pada gambar di atas menjelaskan mengenai susunan pemerintahan era Hafez Al-Assad, dan menunjukkan bahwa partai politik Ba'ath digunakan sebagai instrumen pemerintah Suriah dalam mengendalikan *public opinion* pada masyarakat Suriah. Sebagai contoh dalam pemilihan presiden Suriah, masyarakat Suriah tidak mempunyai hak dalam menentukan presiden. Pemilihan presiden ditentukan atas hasil keputusan anggota partai Ba'ath yang mayoritas anggotanya adalah orang kepercayaan Hafez dan berasal dari kelompok masyarakat Allawite. Partai Ba'ath digunakan sebagai instrumen dalam mengendalikan masyarakat Suriah bukan sebagai pembuat keputusan pada pemerintahan Suriah.

Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Hafez menunjukkan diskriminasi politik antara kelompok masyarakat Allawite dan Sunni. Kelompok Allawite menempati posisi penting pada pemerintahan Hafez Al-Assad sementara, kelompok Sunni tidak diberikan kesempatan yang sama terlibat dalam perpolitikan Suriah. Diskriminasi politik di Suriah mengakibatkan masyarakat Sunni, Suriah semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Suriah.

Diskriminasi politik di Suriah tidak hanya ditunjukkan pada sistem pemerintahan namun, ideologi sekularisme yang diterapkan dalam sistem pemerintahan oleh presiden Hafez Al-Assad menyebabkan pertentangan dari masyarakat Sunni, Suriah. Sekularisme adalah memisahkan ideologi keagamaan dari sistem pemerintahan, agama hanya dijadikan sebagai identitas masyarakat. Ideologi sekularisme tidak melibatkan pengaruh dari ideologi keagamaan untuk terlibat dalam pemerintahan suatu Negara. Kelompok Allawite mendukung adanya sekularisme dikarenakan sesuai dengan kepentingan kelompok Allawite,

sementara kelompok Sunni menginginkan pengaruh agama masuk kedalam sistem pemerintahan Suriah. Hal ini menunjukkan diskriminasi politik yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap masyarakat Sunni, Suriah. Ideologi sekularisme yang dianut pemerintah Suriah membuat kepercayaan kelompok Sunni terhadap pemerintah Suriah semakin berkurang. Kelompok masyarakat Sunni semakin menentang pemerintahan Hafez karena lingkungan politik yang dikuasai kelompok masyarakat Allawite (Nikholas Van Dam, 2011 : 36).

Pemerintah Suriah mendapat protes keras dari Ikhwanul Muslimin akibat diskriminasi politik yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap masyarakat Sunni, Suriah. Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok masyarakat Sunni, Suriah yang menentang pemerintahan rezim Hafez Al-Assad. Kelompok ini berupaya untuk melengserkan kekuasaan rezim Hafez Al-Assad. Upaya kelompok Ikhwanul Muslimin gagal melengserkan kekuasaan Hafez disebabkan dua faktor yaitu (Thomas Pierret, 2014: 2), *pertama* Hafez memiliki kelompok masyarakat yang setia mendukung pemerintahannya yaitu Allawite.

Kedua Hafez Al-Assad memiliki kekuatan militer yang otoriter menyebabkan masyarakat Suriah patuh terhadap rezim pemerintahan Suriah. Hafez Al-Assad menjadi presiden Suriah yang ditakuti oleh masyarakat melalui operasi yang dilakukannya. Tindakan operasi yang dilakukan presiden Hafez Al-Assad menyebabkan dukungan masyarakat Suriah terhadap rezim Hafez semakin berkurang, namun kepemimpinan keluarga Assad di Suriah berlangsung hingga saat ini.

Berakhirnya kepemimpinan otoriter presiden Hafez Al-Assad dikarenakan meninggal dunia pada 10 juni 2000 menyebabkan kekosongan kekuasaan pada pemerintahan Suriah. Kepemimpinan Suriah, kemudian digantikan oleh Bashar Al-Assad yang merupakan anak dari Hafez Al-Assad. Bashar Al-Assad diangkat sebagai presiden Suriah pada 17 juli 2000. Pemerintahan Bashar Al-Assad membuat partai Ba'ath sebagai dasar perpolitikannya di Suriah, oleh karena itu kebijakan yang dibuat Bashar tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan partai Ba'ath termasuk kelompok Allawite. Kebijakan yang dibuat Bashar Al-Assad hanya menguntungkan pemerintah Suriah dan presiden Bashar Al-Assad, seperti kebijakan meningkatkan anggaran militer setiap tahun yang digunakan untuk memperkuat kekuatan militer Suriah.

Pemerintah Suriah lebih mementingkan perkembangan sektor militer dan investasi asing, sehingga sektor *agricultural* kurang diperhatikan oleh pemerintah Suriah. Mayoritas masyarakat Suriah merupakan kelompok Sunni yang bermata pencaharian sebagai petani, diabaikannya sektor *agricultural* mengakibatkan penurunan terhadap hasil panen di Suriah, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat Sunni, Suriah. Sementara kelompok Allawite yang tinggal di Damascus menguasai sektor pemerintahan dan perekonomian pada bidang *real estate* mendapatkan kesejahteraan perekonomian yang baik.

Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah Suriah gagal dalam memperbaiki perekonomian Suriah, dikarenakan ketidaksesuaian kebijakan yang diimplementasikan di Suriah yang merupakan Negara dengan sektor *agricultural* sebagai mata pencaharian utama. Sektor *agricultural* yang tidak diperhatikan

menyebabkan hasil panen yang buruk di Suriah, sehingga pendapatan masyarakat Suriah semakin berkurang. Kebijakan yang dibuat oleh presiden Bashar Al-Assad mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Sunni, Suriah tidak terpenuhi dengan baik dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat Suriah terhadap rezim pemerintahan Suriah (Eline Vessen, 2014 : 38-41).

Pemerintahan Suriah memberikan keistimewaan terhadap kaum Allawite dalam berbagai aspek kehidupan menjadikan kesenjangan antara kelompok masyarakat Allawite dan kelompok Sunni, Suriah. Kesenjangan menjadi penyebab ketidakberpihakan masyarakat Suriah terhadap pemerintah Suriah. Masuknya *Arab Spring* di Suriah mendorong masyarakat dalam menyuarakan protesnya atas tindakan represif rezim Suriah. Masyarakat menyuarakan bentuk protesnya kepada pihak pemerintah dalam bentuk demonstrasi yang kemudian semakin berkembang menjadi konflik sipil di Suriah

4.2. Sejarah Konflik Suriah tahun 2011-2018

Keberhasilan revolusi *Arab Spring* yang dilakukan masyarakat Tunisia dan Mesir dalam menggantikan rezim otoriter, mempengaruhi masyarakat Suriah pada tahun 2011 melakukan demonstrasi yang sama. Suriah merupakan Negara terlama yang terkena dampak *Arab Spring* dan berlangsung hingga saat ini. Masyarakat Suriah melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Suriah yang dilaksanakan pada 15 Maret 2011 di Daara. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah menuntut pergantian rezim Bashar Al-Assad sebagai presiden Suriah. Aksi tersebut dibalas oleh pidato presiden Bashar Al- Assad yang berjanji mereformasi pemerintahannya kembali.

Pemerintah Suriah tidak melakukan reformasi politik dan merespon tindakan demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah dengan menggunakan agresi militer pada April 2011. Pemerintah Suriah menyatakan bahwa agresi militer yang dilakukan pemerintah Suriah merupakan tindakan *defensive* untuk melindungi stabilitas keamanan Suriah. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah disebabkan akumulasi tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap masyarakat Sunni, Suriah. Agresi militer yang dilakukan pemerintah Suriah tidak menghentikan aksi demonstrasi masyarakat Suriah. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah berlangsung secara terus menerus dan menyebar ke hampir seluruh wilayah Suriah seperti Latakia, Homs, Ar-Rasta, Hama, dan Suriah bagian Timur.

Aksi demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara pihak oposisi dan pihak pemerintah Suriah. Tindakan pemerintah Suriah dianggap otoriter karena mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu masyarakat dan sebagian elit-elit pasukan militer pemerintah Suriah membelot dari pemerintahan Suriah seperti Kolonel Riad Al-Assad yang membentuk *Free Syrian Army* (FSA) pada Juli 2011. Sejak Maret 2011 hingga Agustus 2011 tercatat 2.200 warga sipil tewas dikarenakan kekerasan yang terjadi antara pihak oposisi dengan pasukan militer Suriah (<http://www.iamsyria.org/death-tolls.html>, 2011). Kekerasan yang terjadi di Suriah dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik sipil dilihat dari intensitas konflik bersenjata antara rezim pemerintah dan pihak oposisi. *United Nation Commissioner for Human Rights* (UNHCR) mengatakan sejak Maret 2011 sampai Desember 2011 jumlah kematian mencapai 5.500 orang yang mayoritas

merupakan masyarakat sipil, Suriah (<https://www.cbsnews.com/news/syria-crackdown-has-killed-5000-people-un-says/>,2011).

Pasukan militer Suriah yaitu Jendral Mustafa Ahmad Alseikh keluar dari pasukan pemerintah Suriah pada Januari 2012 untuk membela pihak oposisi dan menjadi anggota FSA. Bergabungnya Jendral Mustafa Ahmad Alseikh mengancam keberlangsungan pemerintah Suriah, dikarenakan petinggi militer di pemerintahan Bashar Al-Assad tidak mendukung keberlangsungan rezimnya. Bergabungnya Jendral Mustafa Ahmad Alseikh menjadi anggota FSA, mengakibatkan dukungan besar dari masyarakat Suriah terhadap FSA. Pemerintah Suriah menyikapi hal tersebut dengan melakukan agresi militer terhadap FSA, yang menyebabkan ketidakberpihakan masyarakat Suriah terhadap rezim Bashar Al-Assad.

Agresi militer yang dilakukan pemerintah Suriah menyebabkan ketidakberpihakan masyarakat Suriah terhadap rezim Bashar Al-Assad, sehingga masyarakat Suriah melakukan aksi demonstrasi di Homs, Hama, Idlib, Aleppo dan pinggiran Damascus. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat Suriah berisikan dukungan masyarakat Suriah terhadap kelompok FSA, dalam upayanya melengserkan rezim Bashar Al-Assad. Pasukan militer Suriah dan pihak oposisi melakukan serangan militer dalam memperebutkan Homs. Pemerintah Suriah gagal dalam mempertahankan Homs sebagai wilayah kekuasaannya, Homs menjadi daerah kekuasaan pihak oposisi pada Februari 2012. Sejak konflik Suriah dimulai hingga Februari 2012 tercatat 7500 masyarakat Suriah yang tewas akibat konflik Suriah (www.jpost.com, 2012).

Konflik Suriah semakin sulit diselesaikan dengan adanya pernyataan dari PBB yang menyatakan situasi konflik di Suriah semakin berkembang dan serangan militer antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi berpusat pada dua wilayah Suriah yaitu Damascus dan Aleppo (www.bbc.co.uk, 2012). Salah satu provinsi di Suriah yakni Aleppo berhasil dikuasai oleh oposisi, dan menjadi basis pihak oposisi terutama di Aleppo timur. Aleppo merupakan provinsi terbesar kedua di Suriah sekaligus merupakan markas militer terbesar yang dimiliki pemerintahan Suriah, oleh karena itu provinsi ini diperberatkan oleh pihak oposisi dan pemerintah Suriah.

Konflik Suriah semakin sulit diselesaikan dengan adanya perebutan wilayah kekuasaan antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Wilayah bagi sebuah Negara menjadi syarat penentu untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemerintahan yang berdaulat bagi sebuah Negara. Wilayah merupakan salah satu syarat penentu diakuinya suatu Negara secara *de facto*, oleh karena itu pemerintah Suriah berusaha mempertahankan wilayahnya dari pihak oposisi, berikut merupakan peta konflik wilayah yang berhasil dikuasai pada konflik Suriah tahun 2012 :



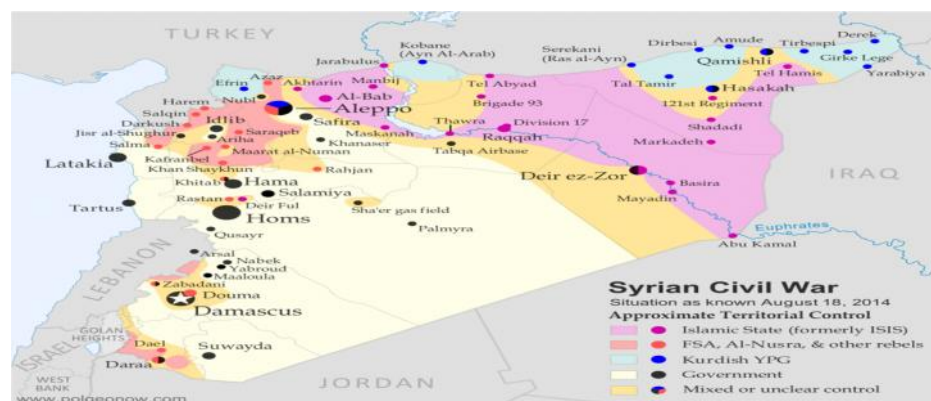
Gambar 4.2 Peta Konflik Suriah Tahun 2012

Sumber : www.polgeonow.com(2012)

Berdasarkan peta konflik di atas, pihak oposisi menguasai Aleppo timur, Homs dan Hama. Sementara pemerintah Suriah menguasai Damascus, Latakia, sebagian besar wilayah Aleppo, Ar-raqa dan Daara. Pemerintah Suriah telah kehilangan wilayahnya pada tahun 2012 namun, wilayah penting seperti Damascus masih dikuasai pemerintah Suriah ([www. Polgeonow.com](http://www.Polgeonow.com), 2012). Konflik Suriah mengakibatkan masyarakat Suriah kehilangan tempat tinggal yang aman sehingga, masyarakat Suriah berusaha mengungsi ke Negara lain. Berdasarkan data yang didapatkan dari *United Nation High Commisioners for Refugee* tercatat lebih dari 500,000 orang pengungsi Suriah meminta perlindungan ke Negara lain dari dimulainya konflik Suriah pada tahun 2011 hingga tahun 2012 (<http://www.iamsyria.org/2012.html>, 2012).

Konflik Suriah berlangsung antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi dalam memperebutkan Raqqa pada akhir tahun 2012 hingga awal tahun 2013. Daerah kekuasaan pemerintah Suriah berhasil dikuasai oleh pihak oposisi yaitu Raqqa pada bulan Maret 2013 dan Pangkalan Militer Menagh pada Agustus 2013, hal ini menandakan bahwa pemerintah Suriah mulai kehilangan beberapa wilayah pentingnya. Konflik Suriah semakin diperparah dengan adanya serangan senjata kimia yang dilakukan pemerintah Suriah pada 30 Agustus 2013 di Ghouta yang merupakan wilayah kekuasaan pihak oposisi. Serangan menggunakan senjata kimia menewaskan 1429 jiwa dilakukan oleh pemerintah Bashar Al-Assad (<http://www.iamsyria.org/2013.html> 2013).

Penggunaan senjata kimia yang dilakukan pemerintah Suriah di Ghouta mendapat kecaman dari AS dan PBB dikarenakan tindakannya yang melanggar HAM. Kecaman yang dilakukan AS dan PBB tidak menghentikan penggunaan senjata kimia yang dilakukan pemerintah Suriah, serangan menggunakan senjata kimia semakin sering digunakan pemerintah Suriah hingga tahun 2014. Keterlibatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada juni 2014 semakin memperkeruh suasana konflik Suriah. Dalam kurun waktu yang singkat yaitu sepanjang tahun 2014, ISIS telah menguasai hampir 35% wilayah Suriah. Berikut merupakan peta konflik Suriah pada tahun 2014 yaitu:



Gambar 4.3 Peta Konflik Suriah tahun 2014

Sumber : himaco.co/syriamap (2014)

Pada peta konflik di atas, menunjukkan wilayah penting di Suriah masih dikuasai oleh pemerintah Suriah seperti Homs, Latakia, Tartus dan Damascus. Sedangkan ISIS menguasai wilayah barat di Suriah seperti Raqqah, Palmyra dan Dier al Zour. Pihak oposisi menguasai beberapa kota di bagian utara Suriah seperti Rahjan. Sementara untuk wilayah penting seperti Aleppo masih diperebutkan oleh pemerintah, oposisi dan ISIS dikarenakan wilayah ini

merupakan pusat komando militer terbesar yang dimiliki pemerintah Suriah (himaco.co/Syriamap, 2014). Menurut data yang di peroleh dari *Syrian Observatory of Human Rights* (SOHR) sebanyak 76.021 jiwa tewas pada tahun 2014 dihitung dari pertama kali konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 (<http://www.SOHR.com/death-tolls.html>, 2016).

Konflik Suriah berlanjut hingga Maret 2015 yang merupakan peringatan 4 tahun berlangsungnya konflik Suriah. Sejak konflik Suriah dimulai hingga Maret 2015 tercatat 250.000 jiwa tewas (<http://www.iamsyria.org/2015.html>, 2015). Menurut Laporan dari SOHR pada Mei 2015, pemerintah Suriah melakukan serangan militer menggunakan bom barel yang mengandung gas klorin di Dimshq, Homs, Daraa dan Idlib sebanyak 6000 jiwa tewas karena serangan tersebut. Penggunaan senjata kimia pada konflik telah melanggar hukum internasional dan juga HAM, namun pemerintah Suriah tetap melakukan serangan tersebut tanpa memikirkan dampak korban jiwa terhadap masyarakat Suriah.

Agresi militer yang dilakukan sepanjang tahun 2015 antara ISIS dan pemerintah Suriah, dimenangkan oleh ISIS dengan diambalnya Kota Palmyra, Suriah. Berdasarkan jenis konflik yang dijelaskan pada bab 2.2.1 konsep *intervention by invitation* diatas, jenis konflik Suriah ditetapkan sebagai konflik yang bersifat *belligerency* dikarenakan pemerintah Suriah tidak dapat mengendalikan konflik yang semakin berkembang dan wilayah kekuasaan pemerintah sudah semakin berkurang dengan dikuasainya Kota Palmyra oleh ISIS.

Wilayah strategis di Suriah yaitu Palmyra dan Aleppo pada tahun 2016 berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah Suriah dari pihak ISIS. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah penting bagi pemerintah Suriah dikarenakan Palmyra merupakan daerah penghasil minyak bumi sementara Aleppo merupakan daerah komando militer terbesar yang dimiliki pemerintah Suriah. Keberhasilan dalam menempati kedua wilayah tersebut merupakan kunci kemenangan bagi Bashar Al-Assad dalam mempertahankan kekuasaannya di Suriah. Konflik Suriah memakan korban yang cukup signifikan, sejak dimulainya konflik Suriah pada tahun 2011 hingga tahun 2016 terhitung sebanyak 297.097 juta jiwa tewas dan mayoritas berasal dari kalangan masyarakat sipil, Suriah (<https://www.SOHR.org-death-toll>, 2016). Jumlah kematian yang semakin meningkat di Suriah menjadi pemerintah Suriah melakukan serangan terhadap pihak oposisi dan konflik Suriah berlangsung hingga tahun 2017.

Pemerintah Suriah melakukan serangan kembali kepada pihak oposisi pada Februari 2017, yang diawali dengan serangan oleh pemerintah Suriah pada pihak oposisi di Daraa dan menewaskan 876 jiwa. Serangan militer kembali dilakukan pemerintah Suriah kepada pihak oposisi di Hama dan menewaskan 1014 jiwa (<http://www.iamsyria.org/2017.html>, 2017). Serangan di Hama berlanjut di bulan April, antara pemerintah Suriah dan oposisi dengan keberhasilan pemerintah Suriah dengan dikuasainya Hama. ISIS semakin kehilangan wilayah kekuasaannya pada Mei 2017 di Suriah dan menarik mundur ke wilayah perbatasan Lebanon-Suriah yaitu Eupharathes. Pemerintah Suriah dan ISIS melakukan serangan militer di daerah Dier al-Zour pada November 2017 dengan keberhasilan pemerintah Suriah mendapatkan sebagian wilayah Dier al-

Zour. Pertempuran merebutkan wilayah Deir al-Zour berlanjut hingga akhir Desember 2017. Pemerintah Suriah mencoba untuk mengusir ISIS dari Eupharathes, pada pertempuran tersebut 173 masyarakat sipil tewas dan pasukan pemerintah Suriah berhasil menangkap Al-Salihyah yang merupakan ketua ISIS.

Menurut data yang diperoleh melalui *Syrian Network for Human Right's* total angka kematian di Suriah sebesar 10.204 jiwa pada tahun 2017 yang bermayoritaskan penduduk sipil Suriah. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tingginya angka kematian di Suriah adalah pemerintah Suriah dan Rusia (<http://www.iamsyria.org/2017.html>, 2017). Tingginya jumlah kematian pada tahun 2017 tidak menghentikan operasi militer di Suriah. Konflik Suriah terus berlanjut dengan dilanjutkannya operasi militer yang dilakukan pemerintah Suriah di Hama dan Idlib pada Desember 2017 dengan keberhasilan diperoleh oleh pemerintah Suriah menguasai kembali wilayah Hama dan Idlib. Konflik Suriah terus berlanjut memasuki awal tahun 2018 dengan serangkaian operasi militer dari pemerintah Suriah dalam mengambil wilayah kekuasaannya kembali.

Operasi militer dilanjutkan pemerintah Suriah di Ghouta pada Februari 2018, untuk mengambil kembali Ghouta dari pihak oposisi. Operasi militer kerap kali dilakukan pemerintah Suriah di Ghouta dengan menggunakan serangan udara yang berlangsung intensif, namun hingga saat ini Ghouta masih dikuasai oleh pihak oposisi sehingga operasi militer kerap kali terjadi. Operasi militer dengan menggunakan senjata kimia dilakukan kembali oleh pemerintah Suriah di Dhouma pada 7 April 2018 untuk merebut wilayah dari pihak oposisi. Serangan menggunakan senjata kimia melalui klorin dan gas salin tersebut mengakibatkan

kematian sebesar 50 masyarakat Suriah dan 500 masyarakat Suriah terluka akibat keracunan gas kimia (www.thesun.co.uk).

Serangan menggunakan senjata kimia yang dilakukan pemerintah Suriah, berhasil merebut kembali Dhouma sebagai wilayah kekuasaan pemerintah Suriah. Tindakan pemerintah Suriah dikecam oleh AS karena melakukan upaya genosida terhadap masyarakatnya, namun pemerintah Suriah mengabaikan kecaman AS dengan dalih bahwa tindakan yang dilakukan merupakan upaya *defensive* melawan pihak oposisi yang mengancam keamanan Suriah. Konflik Suriah kembali berlanjut ditandai dengan pemerintah Suriah yang berhasil menguasai sepenuhnya provinsi Daraa dan Qunietra pada Juli 2018. Konflik Suriah antara pemerintah Suriah melawan pihak oposisi dan ISIS untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di Suriah berlangsung, hingga saat ini belum ditemukan penyelesaian konflik.

4.3. Sejarah Intervensi Rusia

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah intervensi Rusia sebelum intervensinya menggunakan kekuatan militer di Suriah pada tahun 2015. Sejarah intervensi Rusia yang akan dibahas adalah intervensi Rusia di Ossetia Selatan tahun 2008 dan intervensi Rusia di Ukraina tahun 2014. Intervensi Rusia di Ossetia Selatan merupakan intervensi yang dilakukan pertamakali oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet dan berganti nama menjadi Rusia. Sebelum membahas intervensi Rusia di Ossetia Selatan penulis akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya intervensi Rusia di Ossetia Selatan.

Intervensi Rusia di Ossetia Selatan disebabkan konflik yang terjadi antara Georgia dan Rusia mengenai masalah di Ossetia Selatan. Georgia menginginkan reunifikasi wilayahnya atas Ossetia Selatan, sementara Rusia ingin melindungi masyarakat Ossetia Selatan dari Georgia. Adanya kekerasan militer terhadap masyarakat Ossetia Selatan yang dilakukan pemerintahan Georgia pada juli 2004 di zona konflik, menjadikan bentrokan antara pasukan militer Georgia dan Ossetia Selatan. Rusia menyatakan kekhawatirannya atas nasib masyarakat Ossetia Selatan, oleh karena itu Rusia menempatkan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik. Situasi di Ossetia Selatan semakin tidak dapat dikendalikan akibat bentrokan dari pasukan militer Georgia, pasukan militer Ossetia Selatan dan pasukan penjaga perdamaian Rusia. Rusia melakukan intervensi di Ossetia Selatan dengan mengirimkan pasukan tempurnya pada Agustus 2008.

Bentuk Intervensi yang dilakukan Rusia di Ossetia Selatan adalah *humanitarian intervention* yaitu intervensi yang dilakukan menggunakan prinsip kemanusiaan sebagai tujuan intervensinya. *Humanitarian intervention* Rusia di Ossetia Selatan dilegalkan dikarenakan konflik di Osetia Selatan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. *Humanitarian intervention* yang dilakukan Rusia di Ossetia Selatan menggunakan kekuatan militer bertujuan untuk melindungi keberlangsungan hidup masyarakat di Ossetia Selatan. Rusia mempunyai tujuan dalam intervensinya di Osetia Selatan, berikut merupakan tujuan *humanitarian intervention* Rusia di Ossetia selatan (Hans & Henning Schröder, 2008 : 7) :

- a) Rusia mempunyai kewajiban untuk mencegah tindakan genosida yang dilakukan pemerintah Georgia atas masyarakat Ossetia

selatan. Intervensi Rusia di Osetia Selatan membangun *image* Rusia sebagai Negara penegak HAM di dunia internasional.

- b) Rusia ingin menegaskan statusnya di dunia internasional sebagai Negara yang memiliki pengaruh di dunia internasional.

Intervensi Rusia selanjutnya dilakukan di Ukraina pada 1 Maret 2014, intervensi ini dilakukan Rusia dengan menggunakan kekuatan militer. Rusia melakukan intervensinya di Ukraina dikarenakan konflik sipil di Ukraina. Presiden Ukraina, Yanukovych menolak kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan memilih berkerjasama dengan Rusia. Kebijakan yang dilakukan Yanukovych mengakibatkan ketidaksukaan masyarakat Ukraina kepada pemerintah Ukraina. Kebijakan yang dilakukan presiden Ukraina Yanukovych, mengakibatkan dilengserkannya Yanukovych sebagai presiden Ukraina oleh pihak parlementer.

Yanukovych kemudian mengasingkan diri ke Krimea yang merupakan wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Rusia mengemukakan dua alasan dalam tindakannya melakukan intervensi (Mamfaluthy & Heribertus Jaka Triyana, 7-8) *pertama* adanya permintaan dari Yanukovych sebagai presiden Ukraina yang diakui oleh Rusia untuk mempertahankan legitimasi, perdamaian, dan hukum di Ukraina. *Kedua*, intervensi militer Rusia untuk melindungi etnis dan warga negara Rusia yang berada di Krimea. Intervensi militer Rusia mendapat kecaman keras dari berbagai negara terutama AS, hal ini dikarenakan intervensi yang dilakukan Rusia melanggar kedaulatan Ukraina. Intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan Ukraina.

Parlemen Krimea melakukan referendum yang berisikan dua pilihan bagi Krimea yaitu, pertama bergabung dengan Rusia dan yang kedua menjadi bagian integral dari Ukraina pada 16 Maret 2014. Sebanyak 95% penduduk Krimea memilih bergabung dengan Rusia dan berpisah dengan Ukraina. Intervensi militer Rusia di Ukraina berakhir dengan aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea pada 18 Maret 2014. Aneksasi ini dilakukan karena adanya permintaan dari parlemen Krimea kepada Rusia (Mamfaluthy & Heribertus Jaka Triyana, 9).

Intervensi Rusia di Ukraina adalah intervensi militer yang bertujuan mempertahankan legitimasi Yanukovych, namun pada akhirnya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina di Krimea berakhir dengan diambilnya wilayah Krimea sebagai bagian dari Rusia. Tujuan Intervensi Rusia di Ukraina yang *pertama* adalah melindungi masyarakat Rusia yang berada di Krimea. *Kedua* mempertahankan legitimasi Yanukovych untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Ukraina. *Ketiga* memperluas wilayah kekuasaan Rusia dengan diambilnya Krimea sebagai bagian dari Rusia. Berdasarkan penjelasan sejarah intervensi Rusia di atas, maka terdapat perbedaan tujuan intervensi pada penelitian yaitu pemberantasan terorisme dan melindungi asset Negara. Pada intervensi Rusia di Osetia Selatan dan Krimea tujuan intervensi Rusia adalah melindungi keberlangsungan hidup masyarakat.

4.4. Sejarah Intervensi Rusia di Suriah tahun 2015-2018

Intervensi Rusia di Suriah dimulai pada 30 September 2015, keadaan konflik Suriah yang semakin sulit diselesaikan membuat Rusia mengirimkan

pasukan udara untuk menyerang ISIS dan pihak oposisi di Homs dan Hama. Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah dilakukan atas permintaan dari pemerintah Suriah kepada Rusia untuk membantu mengatasi konflik Suriah. Sergev Lavror seorang petinggi militer Rusia menyatakan bahwa intervensi Rusia pada konflik Suriah dilakukan atas dasar permintaan dan persetujuan dari rezim Bashar Al-Assad (Lisa Yazji, 2016: 42).

Menurut Lavrov jika rezim Bashar Al-Assad digantikan, maka kebijakan luar negeri Suriah tidak akan mendukung kepentingan Rusia di Suriah, oleh karena itu Rusia membantu mempertahankan keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Intervensi Rusia di Suriah dilanjutkan pada 1 Oktober 2015 dengan serangan udara kepada ISIS di Kota Raqqa untuk memperoleh kembali wilayah tersebut dari ISIS (www.reuters.com, 2015). Intervensi militer Rusia terus dilanjutkan selama bulan Oktober dengan dilakukannya kerjasama antara angkatan udara Rusia dan Suriah dalam memperoleh wilayah kekuasaan pemerintah Suriah dari pihak ISIS dan oposisi.

Hal ini dibuktikan dengan operasi militer yang dilakukan Rusia-Suriah di kota-kota yang dikuasai oleh ISIS seperti Raqqa, Dier Al-Zour, pangkalan militer ISIS di Tabaqa *Military Airport* dan depot pasokan senjata ISIS di Al-Ajrawi (www.almasdarnews.com, 2015). Operasi militer antara Rusia dan Suriah di Raqqa menggunakan pasukan udara menimbulkan banyak korban jiwa dengan mayoritas korban jiwa adalah penduduk sipil Suriah. Rusia menggunakan pesawat tempur jenis Tu-160, Tu-95MSM, dan Tu-22M3 untuk melakukan serangan udara di Raqqa dan mengakibatkan lebih dari 600 anggota ISIS tewas pada 20

November 2015 (<http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/>). Operasi militer Rusia terus berlanjut samapai akhir tahun 2015 dengan diadakannya operasi militer untuk merebut Provinsi Idlib, Suriah. Operasi militer berlangsung cukup intensif dengan diakhiri kemenangan oleh Rusia yang berhasil menguasai Kota Al-Shaykh Maskin di Provinsi Idlib, Suriah.

Kerjasama operasi militer yang dilakukan antara pasukan udara Rusia dan Suriah cukup berhasil dengan dikuasanya Kota Rabia di Provinsi Latakia pada 24 Januari 2016. Keberhasilan ini sangat penting bagi keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad di Suriah, karena kota ini merupakan markas utama bagi pihak oposisi. Dikuasanya Kota Rabia membuat intensitas operasi militer yang dilancarkan pasukan Rusia dan Suriah semakin meningkat, dibuktikan dengan diadakannya operasi militer gabungan Rusia-Suriah melawan pihak oposisi pada Februari 2016 di daerah Barat Laut Aleppo (iamsyria.org, 2016). Operasi militer Rusia-Suriah di Aleppo bagian Barat Laut berhasil, dengan dikuasanya kembali beberapa kota di bagian Barat Laut Aleppo yang memutuskan jalur suplai utama pihak oposisi. Situasi konflik Suriah dapat dikendalikan kembali oleh pemerintah Suriah setelah keberhasilannya mendapatkan kembali Aleppo.

Rusia mencetuskan gencatan senjata antara Pemerintah Suriah dan oposisi setelah keberhasilan operasi militernya di Aleppo. Gencatan senjata merupakan salah satu upaya Rusia dalam penyelesaian konflik Suriah. Gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi diresmikan pada 14 Maret 2016 ditandai dengan adanya perjanjian perdamaian di Geneva antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Perjanjian perdamaian di Geneva berisikan kesepakatan

antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi, untuk sementara waktu menghentikan serangannya. Perjanjian perdamaian di Geneva memiliki kelemahan yaitu tidak menyertakan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut, sehingga perjanjian perdamaian dapat dengan mudah dilanggar kedua belah pihak.

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan kebijakan untuk menarik mundur sebagian pasukannya dari Suriah karena adanya perjanjian perdamaian antara pemerintah Suriah dan oposisi. Sebagai langkah antisipasi dimulainya konflik Suriah kembali, Rusia menempatkan angkatan lautnya di Pelabuhan Tartus dan angkatan udaranya di Khmeimim karena pasukan Rusia akan terlibat dalam pemantauan gencatan senjata (<http://tass.ru/en/politics/862267>, 2016).

Gencatan senjata berakhir pada pertengahan Maret dilanggar oleh pemerintah Suriah dibuktikan dengan kembali dilakukannya operasi militer Rusia-Suriah untuk merebut Kota Palmyra dari ISIS. Operasi militer yang dilakukan Rusia-Suriah di Palmyra berhasil dengan dikuasainya kota Palmyra oleh pemerintah Suriah pada 27 Maret 2016. Rusia berniat melakukan operasi militer jangka panjang di Suriah, ditandai dengan dibangunnya sistem pertahanan Rusia di Kota Tadmur dan menjadikan, Tadmur sebagai basis operasi militer Rusia di Suriah (Sanu kainikara, 2018 : 89)

Intervensi Rusia di Suriah dilakukan dengan berbagai operasi militer untuk mengambil kembali wilayah kekuasaan kepada pemerintah Suriah. Operasi militer yang menjadi fokus utama Rusia di Suriah adalah operasi militer untuk mengambil kembali Aleppo yang menjadi zona konflik utama di Suriah. Keberadaan Aleppo sangat penting bagi pemerintah Suriah dikarenakan markas

militer terbesar Suriah terdapat di Aleppo. Aleppo diperebutkan oleh pemerintah Suriah, oposisi dan ISIS. Operasi militer Rusia dalam mendapatkan kembali Aleppo berkerjasama dengan pemerintah Suriah dimulai pada 23 September 2016 melalui serangan udara. Operasi militer Rusia dan Suriah terus dilanjutkan di Aleppo, dan berakhir dengan dikuasanya bagian Timur Aleppo oleh pemerintah Suriah (Sanu Kainikara, 2018 : 90). Keberhasilan operasi militer Rusia di Aleppo Timur menjadikan salah satu faktor bahwa intervensi Rusia di Suriah efektif dalam mempertahankan legitimasi pemerintahan Bashar Al-Assad.

Rusia mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur ke Suriah selain itu Rusia juga mendatangkan Admiral Kuznetov pada Oktober 2016 untuk membantu kerjasama operasi militer antara Rusia dan Suriah, hal ini menunjukkan pentingnya Suriah bagi Rusia. Intervensi militer Rusia dengan mendatangkan petinggi militernya mengalami perkembangan yang menguntungkan pemerintah Suriah dengan tewasnya tiga komandan dari pihak oposisi dalam pertempuran di Provinsi Idlib, Suriah pada bulan Oktober 2016. Intensitas operasi militer Rusia terus ditingkatkan dengan serangan dari pesawat tempur Rusia jenis Tu-160, Tu-95 dan Tu-23M3 kepada ISIS di Provinsi Raqqa, Aleppo dan Idlib, sebanyak 50 pesawat tempur dikerahkan dalam operasi militernya ke wilayah tersebut pada November 2016 (Sanu Kainikara ,2018:156).

Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah tidak hanya melalui jalur udara dan darat namun melalui perairan tepatnya laut Mediterania, pada 8 Desember 2016. Rusia melancarkan serangan dengan menembakan misil melalui kapal selam ke Raqqa. Serangan bertujuan untuk mengambil kembali Raqqa dari

kekuasaan ISIS. Rusia belum berhasil mengambil Raqqa dari ISIS, sehingga serangan militer terus dilakukan Rusia di Raqqa sepanjang Desember 2016 dengan pesawat tempur Rusia jenis Tu-22M3 terhadap wilayah Suriah yang dikuasai oleh ISIS (Sanu kainikara, 2018 : 156). Konflik Suriah menyebabkan jumlah kematian di Suriah meningkat, melihat hal tersebut Rusia melakukan upaya perjanjian perdamaian antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi pada akhir Desember 2016. Perjanjian perdamaian antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi membahas mengenai gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan oposisi. Perjanjian perdamaian disetujui kedua belah pihak dan berlaku sejak 30 Desember 2016.

Kementerian Pertahanan Rusia, mengumumkan penarikan pasukannya dari Suriah, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Presiden Putin dikarenakan adanya perjanjian gencatan senjata. Rusia tetap memberikan dukungan terhadap pemerintah Suriah dengan mengirimkan pasokan persenjataan secara rutin ke Suriah, meskipun adanya perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Gencatan senjata gagal dengan adanya pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh pemerintah Suriah.

Konflik Suriah dimulai kembali pada Februari 2017, yang diawali dengan serangan dari pemerintah Suriah kepada oposisi di Kota Daraa dan mengakibatkan 876 jiwa tewas dalam serangan tersebut. Serangan militer kembali dilakukan pemerintah Suriah kepada pihak oposisi di Kota Hama dan menewaskan 1014 (iamsyria.org, 2017). Rusia terus melakukan operasi militer untuk merebut

kembali Provinsi Raqqa dari ISIS pada Mei 2017, korban jiwa pada operasi tersebut sebanyak 1134 jiwa yang bermayoritaskan masyarakat Suriah.

Rusia secara signifikan mengurangi serangan militer di Suriah pada Mei 2017, setelah adanya perjanjian de-eskalasi. Perjanjian de-eskalasi dicetuskan oleh Rusia melihat tingginya jumlah kematian Suriah yang mencapai 10.204 jiwa selama intervensi militer berlangsung tahun 2017. Perjanjian de-eskalasi berisikan mengenai zona aman yang ada di Suriah yang disetujui oleh pemerintah Suriah dan pihak oposisi yang berlaku di Daerah Idlib, Homs utara, Ghouta timur, sebagian Daara dan Qnuitra. Perjanjian de-eskalasi mengakibatkan angka kematian di Suriah berkurang secara signifikan (iamsyria.org, 2017).

United Nations Children's Fund memberikan laporan terdapat 13,5 juta masyarakat Suriah menjadi korban konflik akibat operasi militer yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah dan Rusia. Rusia kembali melakukan operasi militer di Homs yang merupakan daerah kekuasaan ISIS, operasi tersebut berhasil dengan dikuasainya sebagian wilayah Homs pada bulan Juli 2017.

Pemerintah Suriah berkerjasama dengan Rusia dalam upaya merebut kembali wilayah kekuasaannya dengan berbagai operasi militer. Rusia sudah melakukan 28.000 operasi militernya di Suriah terhitung sejak awal dimulai intervensi (iamsyria.org, 2017). Rusia memulai kembali operasi militernya di Suriah dengan menyerang wilayah Dier Al-Zour pada Oktober 2017. Operasi militer yang dilakukan Rusia dan Suriah berhasil merebut setengah wilayah Dier Al-Zour. Konflik di Dier Al-Zour masih berlanjut dikarenakan daerah tersebut belum sepenuhnya dikuasai pemerintah Suriah. Operasi militer di Dier Al-Zour

terus berlanjut, pada bulan November ISIS mengami kekalahan karena serangan gabungan dari Rusia dan Suriah. ISIS kehilangan sebagian wilayah di Dier Al-Zour pada tanggal 27 November 2017. Pada bulan November 2017 terdapat 996 warga sipil terbunuh, 79% di antaranya diakibatkan terkena serangan operasi militer Rusia dan Suriah (iamsyria.org, 2017).

Operasi militer untuk merebut Dier Al-Zour terus berlanjut hingga Desember 2017, pada tahun ini Rusia berhasil menguasai kembali wilayah tersebut dari ISIS. Keberhasilan Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia terbukti efektif dalam menjaga keamanan Suriah dari ancaman terorisme ISIS, hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya Al-Salihyah yang merupakan ketua ISIS pada Desember 2017. Setelah keberhasilan operasi militernya dalam melawan ISIS, Rusia mengumumkan bahwa Suriah telah dibebaskan dari ISIS.

Rusia mengumumkan pembangunan dua pangkalan militer permanen di Suriah, pada akhir Desember 2017. Pembanguna dua pangkalan militer Rusia di Suriah memperkuat kerjasama antara pemerintah Suriah terutama rezim Bashar Al-Assad dengan Rusia. Operasi militer yang dilakukan Rusia di Suriah mengakibatkan jumlah korban jiwa yang besar, terbukti sepanjang tahun 2017 jumlah korban jiwa mencapai 10,204 jiwa dengan mayoritas merupakan penduduk sipil Suriah (iamsyria.org, 2017).

Rusia terus memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah dengan melakukan operasi militer di Provinsi Hama dan Idlib, operasi militer tersebut dilakukan sepanjang januari sampai Febuari 2018. Pada operasi militernya di Idlib Rusia kehilangan pesawat tempur jenis Su-25SM di provinsi Idlib pada 3 Februari

2018. Rusia berkerjasama dengan pemerintah Suriah dalam operasi militernya di Suriah Selatan, yang mengakibatkan pemerintah Suriah sepenuhnya menguasai provinsi Daraa dan Quneitra pada Juli 2018 (www.aljazeera.com, 2018). Keberhasilan operasi militer Rusia-Suriah di Daraa dan Qnuitra, membuat Rusia mendirikan pos pengamatan di Quneitra dan membangun pelabuhan Tartus menjadi pusat angkatan laut Rusia terbesar di Timur Tengah.

Pembangunan fasilitas militer Rusia di Suriah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Rusia dan Suriah dalam menghadapi pihak oposisi yang masih menguasai wilayah di Suriah seperti Idlib. Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah terus berlanjut hingga saat ini walaupun beberapa daerah sudah berhasil dikuasai kembali oleh Suriah seperti Palmyra, Aleppo, Qnuitra dan Daraa. Sebelum intervensi yang dilakukan oleh Rusia, pemerintah Suriah terutama presiden Assad merasa terancam akan keberlangsungan rezim disebabkan pihak oposisi dan ISIS yang menguasai wilayah kekuasaan pemerintah Suriah seperti beberapa wilayah di Provinsi Aleppo dan Palmyra. Semenjak intervensinya Rusia berhasil mengembalikan wilayah Palmyra dan Aleppo kepada pemerintah Suriah. Selain itu Rusia berhasil membuat beberapa kesepakatan seperti perjanjian gencatan senjata dan pembangunan zona aman di empat kota Suriah.

4.5. Dinamika Kerjasama Rusia dan Suriah

Rusia dan Suriah memulai hubungan bilateral pada Agustus 1946 dalam bidang diplomasi dan pertahanan. Kerjasama bilateral dilakukan dengan membuat

perjanjian antar kedua Negara. Isi dari perjanjian tersebut mengenai dukungan diplomatik Suriah kepada Rusia di lingkup internasional dan Rusia memberikan bantuan dalam membangun kekuatan militer Suriah. Rusia menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan di Suriah adalah upaya Rusia menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Suriah berpendapat bahwa kerjasama bilateral antara Rusia dan Suriah menguntungkan kedua belah pihak. Rusia membantu meningkatkan kemampuan militer Suriah dan Suriah menjadi aliansi Rusia di Timur Tengah (Md. Shafiqur Rahaman, 2016 : 8).

Hubungan bilateral Rusia-Suriah semakin dekat dengan bantuan ekonomi, militer dan diplomasi yang diberikan Rusia kepada pemerintah Suriah pada konflik antara Israel dan Suriah tahun 1967. Rusia memberikan bantuan dalam upayanya mendukung Suriah melawan agresi Israel. Bantuan ekonomi yang diberikan Rusia mencapai \$2,5 milyar digunakan untuk membangun kekuatan militer Suriah untuk menghadapi agresi dari Israel pada tahun 1967. Rusia mengirimkan pasukan militer untuk membantu keamanan Suriah pada konflik Suriah-Israel.

Rusia juga memberikan bantuan pada bidang diplomasi dengan cara menghimbau kepada Israel untuk menghentikan serangannya ke Suriah dan memberikan peringatan bahwa Rusia akan melakukan intervensi jika agresi militer tidak dihentikan oleh Israel. Dukungan yang dilakukan Rusia kepada Suriah pada saat konflik Israel-Suriah, mempertegas pandangan dunia internasional bahwa Rusia menganggap Suriah sebagai mitra kerjasama bilateral yang cukup penting.

Kerjasama antara Rusia dan Suriah semakin intensif pada tahun 1970-an ketika presiden Hafez Al Assad menjabat sebagai presiden Suriah. Hubungan bilateral dilakukan secara intensif oleh pemerintah Suriah dengan mengunjungi Rusia untuk mempererat kerjasama bilateral kedua negara. Kerjasama kedua negara ditingkatkan terutama pada bidang keamanan dibuktikan dengan adanya perjanjian pakta pertahanan dan keamanan pada tahun 1971 yang berisikan mengenai perdagangan senjata antara Rusia dan Suriah. Kerjasama perdagangan senjata antara Rusia dan Suriah saling menguntungkan kedua Negara.

Rusia menjadikan Suriah sebagai salah satu sumber ekonomi sementara Suriah mendapatkan keuntungan dalam memperbaiki kekuatan militernya. Suriah berupaya mempererat hubungan bilateral dengan Rusia. Suriah memberikan pelabuhan Tartus kepada Rusia sebagai pangkalan militernya di Timur Tengah pada tahun 1972. Pangkalan Tartus mempunyai letak geografis yang strategis terletak di Laut Mediterania dan memudahkan kerjasama Rusia-Suriah. Tartus menjadi pangkalan militer yang penting bagi Rusia karena Tartus merupakan satu-satunya pangkalan militer milik Rusia yang ada di luar kawasan (Yazji Lisa, 2016 : 45).

Kerjasama bilateral antara Rusia-Suriah diperpanjang melalui pakta perdamaian dan keamanan pada Oktober 1980 oleh presiden Suriah Hafez Al Assad dan presiden Rusia Leonid Brezhnev. Kerjasama bilateral ini diperpanjang selama 20 tahun mengenai bantuan persenjataan dari Rusia ke Suriah (dr Indrani Talukdar, 2016 :5). Pada masa pemerintahan Presiden Rusia Gorbachev hubungan bilateral Rusia dan Suriah merengang karena perbedaan kebijakan luar negeri. Pada pemerintahan Gorbachev Rusia mengalami krisis ekonomi, oleh karena itu

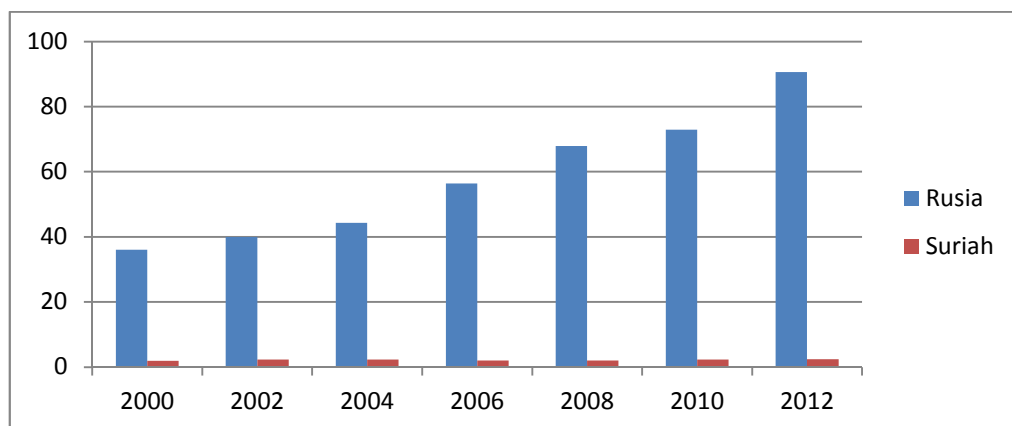
kerjasama dengan Suriah tidak menjadi prioritas utama ditambah lagi adanya hutang luar negeri Suriah kepada Rusia sebesar \$13 miliar membuat kerjasama ini sempat terputus.

Hubungan bilateral kembali dijalin pada tahun 2005 dimana Rusia memberikan keringanan dengan mengurangi hutang luar negeri Suriah sebesar 80% dan menjalin kembali kerjasama bilateral yang dilakukan antara kedua negara. Presiden Bashar Al Assad melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dalam rangka menjalin kembali hubungan bilateral kedua negara. Hasil dari pertemuan tersebut terjalinnya kerjasama yang menguntungkan bagi Suriah dalam berbagai bidang seperti militer, infestasi pada perusahaan di Suriah dan transfer teknologi dari Rusia.

Kerjasama yang dilakukan Rusia dan Suriah menunjukkan kebijakan luar negeri Rusia dalam melakukan kerjasama dengan Negara di Timur Tengah. Kerjasama bilateral yang dijalin antara Rusia dan Suriah menjadi penyebab Rusia mendukung pemerintah Suriah. Kerjasama bilateral yang dilakukan Rusia di Suriah salah satunya adalah dengan melakukan investasi pada bidang energi. Suriah merupakan salah satu Negara pemasok enegri ke Rusia, oleh karena itu keberadaan Suriah sangat penting dalam membantu Rusia mencapai kebutuhan energi. Kerjasama dalam bidang energi merupakan kerjasama yang penting bagi pertumbuhan perekonomian sebuah Negara, dikarenakan energi dibutuhkan dalam perkembangan sektor industry di Rusia. (dr. Indrani Talukdar, 2016; 4-6).

Kerjasama bilateral yang dilakukan Rusia dan Suriah terus terjalin meskipun terjadi konflik sipil di Suriah. Rusia mendukung rezim pemerintahan Bashar Al-Assad dengan melaksanakan kerjasama perdagangan senjata ke Suriah.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Anatoly Antonov mengatakan bahwa Rusia tidak akan menghentikan pengiriman senjata ke Suriah meskipun banyak kencaman dari dunia internasional. Antolov juga mengatakan, Rusia tidak melanggar hukum internasional dengan menjual senjata kepada pemerintah Suriah (dr.Indrani Talukdar, 2016 :8). Menurut penulis terdapat alasan yang melatar belakangi hubungan kerjasama bilateral antara Rusia dan Suriah dilihat dari kebijakan yang ada di kedua Negara. Adanya kesamaan dalam hal memperkuat kekuatan militer yang dianut Rusia dan Suriah. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya anggaran belanja dalam bidang militer Rusia dan Suriah setiap tahunnya dalam grafik sebagai berikut : (militarybudget.org)



Gambar 4.5 Grafik *Military expenditure* Rusia dan Suriah 2000-2012 Berdasarkan US dollar

Sumber : Data diolah oleh penulis dan didapatkan melalui militarybudget.org

Berdasarkan grafik di atas menjelaskan mengenai anggaran belanja militer Rusia dan Suriah. Rusia menaruh perhatian lebih untuk membangun kekuatan militernya dibuktikan dengan adanya peningkatan signifikan setiap tahunnya dalam hal anggaran militer. Peningkatan anggaran belanja militer Rusia pada

tahun 2012 sebesar 90 juta US\$, mengakibatkan Rusia berada di posisi ketiga di dunia dalam hal *military expenditure* setelah AS dan Tiongkok (militarybudget.org/russia). Berdasarkan grafik di atas *military expenditure* Suriah meningkat secara stabil dari tahun ke tahun dan pemerintah Suriah selalu menjaga kestabilan anggaran belanja militer tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Pemerintah Suriah menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer diperlukan untuk membantu keberlangsungan pemerintah Suriah. Persamaan kebijakan dalam bidang militer membuat hubungan kerjasama antara Rusia dan Suriah semakin erat terjalin.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil dua kesimpulan dari bentuk dan tujuan intervensi Rusia pada konflik Suriah tahun 2011-2018 sebagai berikut :

1. Bentuk intervensi Rusia pada konflik Suriah adalah *military intervention* dan *intervention by invitation*. Intervensi militer yang dilakukan Rusia dilakukan atas dasar undangan maupun permintaan dari pemerintah Suriah yang berdaulat untuk mengintervensi konflik sipil di Negaranya. Menurut Christopher J. Le Mon *intervention by invitation* dinyatakan legal akan intervensinya pada konflik sipil Negara lain, dengan adanya persetujuan dari kepala pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu intervensi yang dilakukan oleh Rusia di Suriah adalah legal, permintaan dari Bashar Al-Assad kepada Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik. Legalitas dianggap penting dalam mengetahui tercapainya tujuan intervensi Negara. *Intervention by invitation* digunakan Rusia dalam membantu pemerintahan Suriah. Upaya Rusia dalam menyelesaikan konflik Suriah belum tercapai,

namun upaya Rusia dalam membantu keberlangsungan rezim Bashar Al-Assad telah tercapai dengan keberlangsungan rezim Assad hingga saat ini.

2. Intervensi militer yang dilakukan Rusia di Suriah merupakan upaya Rusia dalam mencapai tujuannya di Suriah. Di dalam penelitian penulis menemukan 6 tujuan yang berusaha dicapai di Suriah yaitu; melindungi stabilitas negara dari ancaman terorisme (ISIS), melindungi fasilitas militer, melindungi kerjasama ekspor perdagangan persenjataan, melindungi investasi, promosi kekuatan militer Rusia dan mempertahankan pengaruh Rusia. Tujuan yang benar-benar penting dan harus dicapai oleh Rusia di Suriah adalah melindungi stabilitas negara dari ancaman terorisme (ISIS), melindungi fasilitas militer, melindungi kerjasama ekspor perdagangan persenjataan dan melindungi investasi. Keempat tujuan tersebut berdampak secara langsung terhadap keamanan dan stabilitas Rusia serta pertumbuhan perekonomian Rusia. Sedangkan tujuan mempertahankan pengaruh adalah tujuan jangka panjang Rusia dalam upaya membangun kejayaan Rusia di masa lalu.

6.2. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengemukakan dua saran dari *“Bentuk dan Tujuan Intervensi Rusia Pada Konflik Suriah Tahun 2015-2018”*, sebagai berikut :

1. Intervensi Militer Rusia dalam membantu presiden Bashar Al-Assad pada tahun 2015 mengakibatkan jumlah korban jiwa yang besar, hal ini menunjukkan pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia di Suriah. Menurut

penulis dalam menekan jumlah korban yang semakin meningkat di Suriah, maka penggunaan persenjataan yang digunakan Rusia harus dibatasi dengan tidak menggunakan senjata kimia dan menghentikan pengiriman persenjataan dari Rusia ke Suriah.

2. Intervensi yang dilakukan Rusia mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu tujuan ekonomi, pertahanan dan politik. Dalam mencapai tujuannya terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan Rusia diharapkan dapat mencapai tujuan ekonomi dan pertahanan dengan tidak merugikan Suriah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran terkait analisis bentuk intervensi dan tujuan intervensi negara terhadap konflik sipil negara lain. Hal ini penting untuk diketahui dikarenakan tindakan yang dilakukan suatu Negara merupakan representasi dari kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mempunyai dua kelemahan yang pertama fokus penelitian terletak pada satu Negara yaitu Rusia, sementara dalam konflik Suriah Negara seperti AS, Tiongkok dan Iran terlibat dalam konflik Suriah. Kelemahan yang kedua adalah tidak membahas dampak persaingan kekuatan militer antara Rusia dan AS di Suriah secara lebih mendalam. Bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan dapat lebih baik dalam menentukan objek penelitian, serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya mencari referensi melalui buku, jurnal dan internet untuk mendukung penelitian dengan tema yang sama.

Daftar Pustaka

Buku:

- Huala, A. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asrudin & Suryana. (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- John, B. & Steve, S. (2001). *The Globalization of Worlds Politics*. 2nd edition. Lonfon : Oxford University Press.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*. 2nd edition. New York : Macmillan Publishing Company.
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hinnebusch & Raymond (2001). *Syria: Revolution ,From Above*. New York & London : Routledge.
- Plano, J. C. dan Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung : Abardin
- Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York : The Free Press.
- Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Bina Cipta .
- Waltz, K. N. (2001) *Man the State and War : A Theoretical Analysis*. New York : Columbia University Press.

- Haas, M. D. (2010). *Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century : Putin, Medvedev and beyond*. USA & Canada : Routledge.
- Ortega, M. (2001). *Military Intervention and European Union*. The Institute for Security Studies of Western European Union
- Mas'ood (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.
- Dam, N. V. (2011), *The Struggle for Power in Syria; Politic and Society under Assad and Baath Party*. London : L.B Tauris.co & Ltd. London
- Sudarto (1995). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Coulombis, T. A. & Wolfe, J. A. (1986). *Introduction to international relations power and justice*. Englewood cliff : Prentice Hall.

Internet

- Aljazeera News (2018). *Rebels in Southern Syria Reach Deal To End Violence*. Tersedia di <https://reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa/russia-jets-strike-islamic-state-in-northensyria-al-maydeen-tv-idUSKCNOR201510012015>.
- Almasdarnews(2015). Tersedia di <https://www.almasdarnews.com/article/russian-air-force-begins-massive-aerial-campaign-against-isis-in-east-syria/> 2015
- Almonitor (2013). *Syria Sign Offshore Oil and Gas Exploration Deal With Syria*. Tersedia di. <https://www.al-monitor.com/pulse/sites/almonitor/contents/article/business/2012/12/syria-russia-sign-offshore-oil-deals.html>.
- Businessinsider (2018). Top 10 Countries That Bought Russia Weapon. Tersedia di. <https://www.businessinsider.com/russia-weapon-sales-top-countries-2018-4>
- Cbsnews (2012). *Syria Crackdown Has Killed 5000 People* Tersedia di <https://www.cbsnews.com/news/syria-crackdown-has-killed-5000-people-un-says/>

- Iamsyria (2011-2017). *Syria Civil War Death Toll*. Tersedia di <http://www.iamsyria.org/death-tolls.html>
- IamSyria (2011-2017). *Syrian Civil War Timeline* Tersedia di <http://www.iamsyria.org/2011.html>
- JerusalemPost.com. (2012). *Syria Civilian Death Toll Reach Over 7500 People*. <https://www.jpost.com/Middle-East/UN-Syrias-civilian-death-toll-well-over-7500>
- Latimes (2015) *Russia Launch Attack In Syria*. Tersedia di <https://www.latimes.com/europe-/la-fg-kremlin-oks-troops-20150930-story.html>.
- Reuters (2016). *The Russian Secretly Dying For Kremlin*. Tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-insight-idUSKBN12Y0M6>
- Semuainfo (2016). *Perbandingan Kekuatan Militer Antara Amerika Vs Rusia 2015-2016*. Tersedia di <http://www.Semuainfo.net/2016/01/perbandingan-kekuatan-militer-rusia-dan-usa-2016.html>
- SIPRI (2013) *Arms Transfer Database*. Tersedia di <https://www.sipri.org/database/armstransfer>
- SIPRI. *Arms Export From Russia 2000-2012* Tersedia di [https://www.armstrade.sipri.org/armstrade/html/export values.php](https://www.armstrade.sipri.org/armstrade/html/export%20values.php)
- Sputiknews.com (2016). *Russia Military Base In Syria*. Tersedia di [https://sputniknews.com/politic/20161046207689-russian-base syria-tartus](https://sputniknews.com/politic/20161046207689-russian-base-syria-tartus).
- Thesunuknews (2018). *Toxic Slaughther Deadly Nerve Agent Used in Syria Chemical Attack That Killed 70*. Tersedia di [https://thesun.co.uk/news/syria-chemical -attack-nerve-agent-evidence-latest-news/](https://thesun.co.uk/news/syria-chemical-attack-nerve-agent-evidence-latest-news/).
- Traddingeconomic.com (2017) *Syria Terrorism Index*. Tersedia di <https://www.traddingeconomic.com/syria/terrorism-index->.
- Traddingeconomic.com (2019) *Russia Military Expenditure*. Tersedia di <https://www.traddingeconomic.com/Russia/militaryexpenditure/>
- Traddingeconomic.com (2019) *Syria Crude Oil Production*. Tersedia di <https://www.traddingeconomic.com/index/Syria/crudeoilproduction>
- Traddingeconomic.com (2019) *Syria Military Expenditure*. Tersedia di <https://www.traddingeconomic.com/Syria/militaryexpenditure/>

Violations Documentation Center (2018). *Statistical Report on Casualty in Syria*. Tersedia di https://vdc-sy.net/wp-content/uploads/2018/02/Monthly_Stat_Rep_Jan18_EN_02-1.pdf

Jurnal :

- Twardowski, A. (2015). 'The Return of Novorossiia: Why Russia's Intervention in Ukraine Exposes the Weakness of International Law'. dalam *Minnesota Journal of International Law*. No. 24
- Bishara, A. (2015). 'Russian Intervention in Syria : Geostrategy is Paramount'. dalam *Arab Center for Research and Policy Studies*.
- Martin, B. G. (1990). 'The Soviet Union at Crossroad : Gorbachev reform programe'. dalam *Foreign Affair Research Group*
- Nandanaardi, D. A. (2014). 'Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012'. dalam *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol. 3, No. 1.
- Gorenburg, D. (2012). 'why Russia supports repressive regimes in Syria and Middle east'. dalam *PONARS Eurasia Policy Memo*. No 7
- Nuechterlein. (2009). 'National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-making'. dalam *British Journal International Studies*, Vol 2. No. 3
- Talukbar, I. (2016). 'Russian Strategic interest in Syria'. dalam *India Council of World affair*
- Stepanova, E. (2016). 'Russia's policy on Syria after the start of military engagement'. dalam *Ponars Eurasia Policy Memo*. No 421.
- Souleimanov, E. A. & Petrylora, K. (2015). 'Russia's policy toward Ismlamic State'. dalam *Middle East Policy*. Vol 22, No 3
- Eyal Zisser. (2013) . "Can Assad Syria Survive Revolution". *Dalam middle East Quarterly*, vol 20, no 9
- Hans & Schröder, H. (2008). 'A Short, Victorious War? Russian Perspectives on the Caucasus Crisis'. dalam *WP-Berlin Research Paper*. No. 9
- Noor, I. (2014). 'Analisis Rusia dalam Konflik Suriah'. dalam *ejournal hubungan internasional*. Vol 2. No 4
- Irdayanti. (2012). 'Kebijakan Penolakan Rusia Atas Strategi Barat di Suriah'. dalam *jurnal transnasional*. Vol 4. No 1

- Berzins, J. (2013). 'Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions'. dalam *National Defence Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research*. Strategic review no 7.
- Kurniawan, L. M. K. (2012). 'Dukungan Rusia Terhadap Rezim Bashar Al-Assad dalam Konflik Internal Suriah'. dalam *e-journal Hubungan Internasional*
- Omelicheva, M. Y. (2009). 'Counvergen of counterterrorism policies : A Case of Studies of Kyrgyztan and Central Asia'. dalam *Studies of Conflict and Terorism Journal*. Vol 10. No.32
- Kaim, M. & Tammiga, O. (2015). 'Russia's military intervention in Syria : it's operation plan, objective and consequences for the west policies'. dalam *Stiftung Wissenschaft und Politic*
- Russel, M. (2016). 'Russia Humanitarian Aids Policy'. dalam *European Parliamentary Research Service*
- Byrne, M. (2016). 'Consent and the use of force: an examination of intervention by invitation as a basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen'. dalam *Journal on the Use of Force and International Law*. Vol 3. No.1
- Saputra, M. G. (2018). 'Keterlibatan Rusia dalam Perang Sipil Suriah Tahun 2011-2018'. dalam *Jurnal Analisis Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 7, No 3
- Olson, R. (1978). 'The Baath in Syria 1947-1979 : an interpretative historical essay part one'. dalam *Oriente Moderno Anno*. No 12
- Alsadi, S. (2017). 'Russia Military Involvement in Syria : An Integrated Realist and Constructives Approach'. dalam *International Journal of Law Humanites & Social*, Vol 1, No5
- Merchier, S. (2016). 'The legality of Russian airstrike in Syria and Intervention by invitation'. dalam *International Relation Students Journal*
- Islam, S. (1993). 'Russia rough to capitalism'. dalam *Foreign Affair*, No 2
- Pierret, T. (2014). 'The Syrian Baath Party and Sunni Islam : Conflict and Connivace'. dalam *Middle East Brief*, Vol2, No.77